

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 9

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 5 MARET 2021

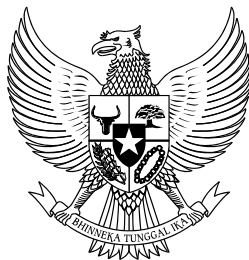
NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 24);
  3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 57);
  4. Berita Acara hasil Verifikasi Renstra Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 Nomor 050/019/Bappeda/2021 tanggal 24 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 24), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD  
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat DPRD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD  
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD.

e. BAB V ...

- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD lima tahun mendatang.
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
Memuat indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
  - h. BAB VIII : PENUTUP  
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

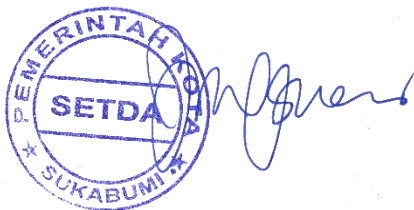
cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



Hj. LULU YULIASARI, S.H.  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 9 TAHUN 2021  
PERIHAL : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN  
2018-2023.

---

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2018-2023

---

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan di Daerah, maka Perubahan Renstra yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat perlu dilakukan revisi untuk mensinergikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Revisi Renstra memuat perubahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program atau kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Renja tahunan Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Renja tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain ditandai dengan adanya tuntunan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan. *Good governance* merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan.

Perubahan perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Perubahan Renstra pun merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari mulai pembuatan keputusan hingga pelaksanaan keputusan tersebut. Perubahan perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja.

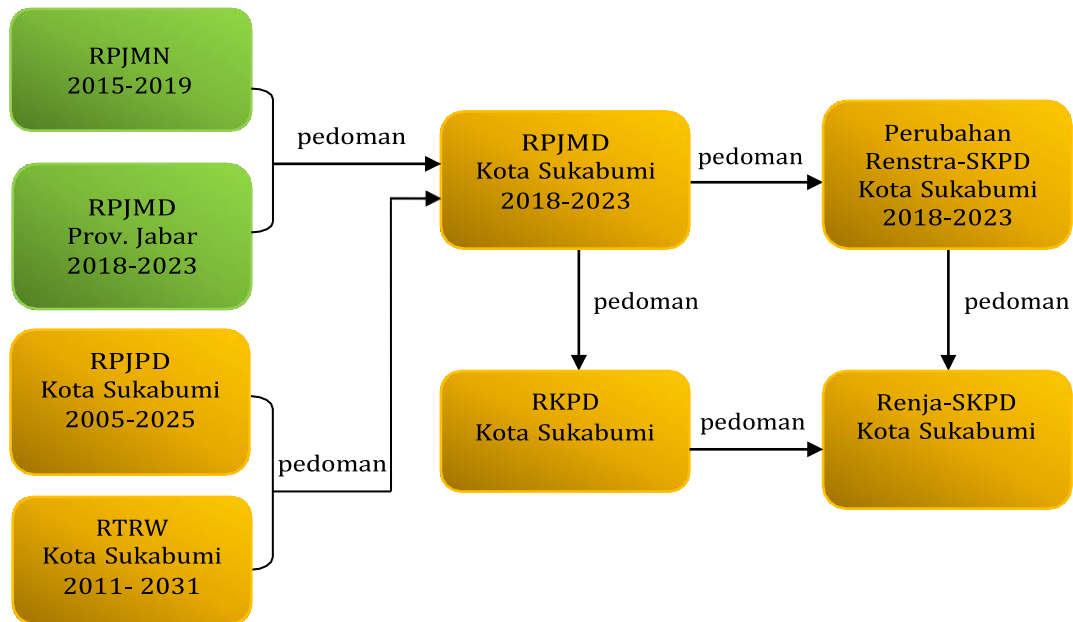
Dalam penyusunan perubahan Renstra dilaksanakan revisi terhadap RPJMD dan Renstra Provinsi guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan perubahan Renstra, lebih lanjut dalam pelaksanaannya perubahan Renstra dijabarkan dalam Renja yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Kegiatan perumusan Perubahan Renstra dilakukan secara simultan atau bersamaan waktunya dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan perubahan Renstra. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan perubahan Renstra, maka dilaksanakan Forum Perangkat Daerah (FDD) yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Sekretariat.



Kesepakatan yang dihasilkan FPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan perubahan Renstra menjadi rancangan akhir perubahan Renstra. Selanjutnya rancangan akhir Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi Perubahan Renstra. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan perubahan Renstra yang lebih lanjut akan menjadi pedoman Sekretariat dalam menyusun Rancangan Renja.

Hubungan antara Perubahan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan dengan gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini:

Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 24);
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 57);
17. Berita Acara hasil Verifikasi Renstra Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 Nomor 050/019/Bappeda/2021 tanggal 24 Februari 2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Penyusunan perubahan Renstra Tahun 2018-2023 adalah:

1. penjabaran secara operasional visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. sebagai pemberi arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai;
3. sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan; dan
4. sebagai pemberi informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 adalah:

1. untuk menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Tahun 2018-2023 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan Perangkat Daerah;
2. untuk pedoman cara kerja Sekretariat terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;
3. untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; dan
4. bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kota Sukabumi berikutnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri atas 8 (delapan) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I      PENDAHULUAN**  
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II     GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**  
Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa aja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD**  
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk merumuskan isu-isu strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN**  
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII  PENUTUP**  
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### 2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. bagian umum dan keuangan, membawahkan:
  1. subbagian program dan keuangan;
  2. subbagian tata usaha dan kepegawaian;
  3. subbagian rumah tangga.
- c. bagian persidangan dan perundang-undangan, membawahkan:
  1. subbagian kajian perundang-undangan;
  2. subbagian persidangan dan risalah;
  3. subbagian humas, protokol dan publikasi.
- d. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, membawahkan:
  1. subbagian fasilitasi penganggaran;
  2. subbagian fasilitasi pengawasan;
  3. subbagian kerja sama dan aspirasi.
- e. kelompok JF.

#### 2.1.2 Tugas Sekretariat DPRD:

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

#### 2.1.3 Fungsi Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### 2.2 Bidang Tugas Unsur-unsur Sekretariat

#### 2.2.1 Sekretaris DPRD mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. menyusun program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membantu ...

- b. membantu pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas di bidang fasilitasi rapat DPRD, urusan pengelolaan tata usaha, umum, perlengkapan, kehumasan dan keuangan DPRD;
- c. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. membina prestasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
- e. mengoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan kode etik, dukungan pengawasan penggunaan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- f. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. memberikan pelayanan teknis administratif dan keuangan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- h. memverifikasi, mengoordinasi, dan mengevaluasi proses pembahasan peraturan Daerah yang meliputi peraturan Daerah prakarsa dan peraturan Daerah usulan Pemerintah Daerah.
- i. mengoreksi, menyempurnakan, dan memaraf atau menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
- j. membina dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan DPRD dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan bahan, data, atau informasi serta penyebaran informasi kegiatan DPRD;
- m. menyelenggarakan penyusunan dan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan urusan protokol atau hubungan antar lembaga kegiatan DPRD;
- n. menyelenggarakan penyusunan dan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD;
- o. mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD secara teknis operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional bagian umum dan keuangan berdasarkan program kerja sekretariat DPRD;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- d. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- e. fasilitasi peningkatan kapasitas kinerja anggota DPRD;
- f. pengelolaan tenaga ahli dan kelompok pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- g. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- i. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- j. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- k. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

- l. evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- m. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- n. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- o. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- p. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- q. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- r. verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat;
- s. evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- u. evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- v. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- w. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- x. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian umum dan keuangan; dan
- y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional bagian persidangan dan perundang-undangan berdasarkan program kerja sekretariat DPRD;
- b. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan Daerah;
- d. fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD;
- e. verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengumpulan bahan penyiapan rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD;
- g. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- h. koordinasi pembahasan rancangan peraturan Daerah;
- i. penyusunan, verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- j. verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah;
- k. penyelenggaraan hubungan masyarakat, keprotokolan dan publikasi;
- l. fasilitasi penyusunan rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian persidangan dan perundang-undangan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.4 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan berdasarkan program kerja sekretariat DPRD;
- b. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah prioritas plafon anggaran sementara/kebijakan umum perubahan prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- c. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah/perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

d. fasilitasi ...

- d. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan rancangan peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- e. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- f. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- g. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia (BPK RI);
- h. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
- i. fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- j. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian persetujuan kerja sama daerah;
- n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) 34 (Tiga puluh empat) Orang PNS, 20 (Dua puluh) pegawai THL (Tenaga Harian Lepas) dan 1 (Satu) pegawai Sukwan (tenaga sukarelawan) dengan jenis kelamin 43 (Empat puluh tiga) Pria dan 12 (Dua belas) Wanita yang beraneka ragam latar belakang pendidikan, usia, status kepegawaian maupun kepangkatan. Gambaran SDM Aparatur Sekretariat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah   |
|----|---------------|----------|
| 1  | Pria          | 43 orang |
| 2  | Wanita        | 12 orang |
|    | Jumlah        | 55 orang |

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah   |
|----|--------------------|----------|
| 1  | Pasca Sarjana / S3 | -        |
| 2  | Pasca Sarjana / S2 | 9 orang  |
| 3  | Sarjana / S1       | 20 orang |
| 4  | Sarjana Muda / D3  | 1 orang  |
| 5  | SLTA               | 25 orang |
| 6  | SMEA               | 0 orang  |
| 7  | STM                | 0 orang  |
| 8  | SLTP               | 0 orang  |
| 9  | SD                 | 0 orang  |
|    | Jumlah             | 55 orang |

Tabel 2.3

Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Golongan

| No | Golongan     | Jumlah   |
|----|--------------|----------|
| 1  | Golongan I   | 0 orang  |
| 2  | Golongan II  | 10 orang |
| 3  | Golongan III | 20 orang |
| 4  | Golongan IV  | 4 orang  |
|    | Jumlah       | 34 orang |

Tabel 2.4

Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

| No | Diklat Teknis Fungsional | Jumlah  |
|----|--------------------------|---------|
| 1  | Diklatpim II             | 1 orang |
| 2  | SPAMEN                   | -       |
| 3  | Diklatpim III/ Spama     | 3 orang |
| 4  | Diklatpim IV             | 5 orang |
| 5  | Adum / Adumla            | -       |
|    | Jumlah                   | 9 orang |

Tabel 2.5  
Pegawai Sekretariat DPRD yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional

| No     | Diklat Teknis Fungsional | Jumlah  |
|--------|--------------------------|---------|
| 1      | Barang dan Jasa          | 2 orang |
| 2      | Notulensi                | -       |
| 3      | Arsiparis                | -       |
| 4      | Tata Kelola Keuangan     | -       |
| Jumlah |                          | 2 orang |

Tabel 2.6  
Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural

| No     | Jabatan Struktural | Jumlah   |
|--------|--------------------|----------|
| 1      | Eselon II          | 1 orang  |
| 2      | Eselon III         | 3 orang  |
| 3      | Eselon IV          | 9 orang  |
| Jumlah |                    | 13 orang |

Tabel 2.7  
Pegawai Tenaga Harian Lepas Sekretariat DPRD

| No     | Jabatan Struktural | Jumlah   |
|--------|--------------------|----------|
| 1      | Sarjana            | 7 orang  |
| 2      | SMA                | 13 orang |
| Jumlah |                    | 20 orang |

Tabel. 2.8 ...

Tabel. 2.8  
Berita Acara Aset tetap dan Aset lainnya

| No. | Jenis Aset/Barang                   | Jumlah  | Keadaan |        |       |
|-----|-------------------------------------|---|---------|--------|-------|
|     |                                     | Buah/Jenis  | Baik    | Sedang | Rusak |
| 1   | 2                                   | 3   | 4       | 5      | 6     |
| 1   | Gedung DPRD                         | 1 Beton bertingkat<br>Luas Lantai<br>143,890 m <sup>2</sup> , Luas Tanah<br>Bangunan 1,305 m <sup>2</sup> | 1       | -      | -     |
| 2.  | Ruang Rapat<br>Paripurna            | 1 Ruang   | 1       | -      | -     |
| 3.  | Ruang Rapat Alat<br>Kelengkapan     | 1 Ruang   | 2       | -      | -     |
| 4.  | Ruang Komisi                        | 3 Ruang   | 3       | -      | -     |
| 5.  | Ruang Fraksi                        | 8 Ruang   | 7       | -      | -     |
| 6   | Kendaraan Dinas<br>Pimpinan DPRD    | 3 Sedan   | 3       | -      | -     |
| 7   | Kendaraan Dinas<br>Jabatan          | 1 Sedan, 3 Avanza, 2 APV  | 4       | -      | -     |
| 8   | Kendaraan Dinas<br>Jabatan Roda 2   | 7   | 7       | 1      | -     |
| 9   | Laptop / Net book                   | 10 toshiba, Accer   | 9       | -      | 1     |
| 10  | Komputer                            | 20 Intel, Acus  | 12      | -      | -     |
| 11  | Printer                             | 6 Epson, 3 Canon,   | 9       | -      | 1     |
| 12  | Internet                            | Speedy  | 2       | -      | -     |
| 13  | Radio tape / Perekam                | 10 radio dan tape kecil, 11<br>sony 2 GB  | 13      | -      | 8     |
| 14  | Sound system                        | 1 Philips   | 1       | -      | -     |
| 16  | Speaker sound system                | 4 Philips   | 4       | -      | -     |
| 17  | Camera                              | 4 buah  | 3       | -      | -     |
| 18  | Handy cam                           | 2 buah  | 2       | -      | -     |
| 19  | Microphone                          | 32 dudukan, wire less,<br>meja  | 32      | -      | -     |
| 20  | Pesawat telpon dan<br>Mesin fax     | 2 panasonic, Sharp  | 2       | -      | -     |
| 21  | Kipas angin                         | 5 besar dan kecil   | 1       | -      | 4     |
| 22  | Mesin tik                           | 4 besar dan kecil   | 3       | -      | -     |
| 24  | Dispencer                           | 10 cosmos, Fuji   | 6       | -      | 14    |
| 25  | Aerosol dispencer                   | 7   | 2       | -      | -     |
| 26  | Kursi                               | 509 sofa, tamu, putar,<br>lipat, rapat<br>dan kerja   | 501     | -      | 339   |
| 27  | Meja                                | 118 bundar, rapat, biro,<br>komputer,<br>dorong   | 107     | -      | 11    |
| 28  | Papan informasi                     | 5 White Board   | 5       | -      | -     |
| 29  | Lambang DPRD                        | 1 Buah  | 1       | -      | -     |
| 30  | Foto Presiden dan<br>Wakil Presiden | 1 Set   | 1       | -      | -     |

|    |                         |                     |   |    |    |
|----|-------------------------|---------------------|---|----|----|
| 31 | Kotak suara             | 2 kayu dan kaca     | 2 | -  | 2  |
| 32 | Dudukan bendera         | 2 Kayu              | 1 | -  | 1  |
| 32 | Lambang garuda          | 4 Buah              | 1 | 3  | 3  |
| 33 | Lampu hias              | 4 gantung           | 4 | -  | -  |
| 34 | Jam dinding             | 7 Seiko             | 1 | -  | 6  |
| 35 | Hiasan dinding          | 5 unit              | 4 | 1  | -  |
| 38 | telephone               | 8 Unit              | 2 | -  | 6  |
| 39 | Palu sidang / alas palu | 5 Kayu              | 1 | -  | 4  |
| 40 | Rak arsip, Rak buku     | 4 Kayu              | 2 | 1  | -  |
| 42 | Kotak kayu tanaman      | 2 Kayu              | 2 | -  | -  |
| 43 | Lemari arsip            | 18 besar dan sedang | 4 | 4  | 10 |
| 44 | Tekas                   | 6 Kayu              | 5 | 1  | -  |
| 45 | Gardeng                 | 18 fiber dan kain   | 8 | 10 | -  |
| 47 | Kipas angin             | 4 besar dan kecil   | 1 | -  | 3  |
| 48 | Ac                      | 24 nis dan shap     | - | 22 | 2  |
| 49 | Locker                  | 5 Kayu              | 1 | 1  | 3  |
| 50 | Rak bunga               | 2 kayu              | 2 | -  | -  |
| 51 | Filling cabinet         | 25 besi             | - | 19 | 6  |
| 52 | Vacum cleaner           | 2                   | 2 | -  | 2  |
| 53 | Generator               | 2 Buah              | - | 1  | 1  |
| 54 | Organ                   | 1 yamaha            | 1 | -  | -  |
| 55 | Receiver                | 1 parabola          | 1 | -  | -  |
| 56 | Antene                  | 1 parabola unifrom  | 1 | -  | -  |
| 57 | Proyektor               | 4 lcd               | - | -  | 4  |
| 58 | Alat Pemadam Kebakaran  | 8 Alpa Protect      | 8 | -  | -  |

Sumber: Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD

#### 2.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

1. Kinerja yang dimaksudkan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik.
2. Kinerja suatu lembaga tidak terlepas dari kinerja karyawannya, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kemajuan, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Sekretariat merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pelayanan yang diberikan masing-masing kepala bagian dan kepala subbagian sudah mengacu kepada tugas pokok dan fungsi. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bagian dan sub bagian disajikan dalam tabel 2.3 (terlampir).

Tabel 2.9.A (T.C. 23.)

## Gambaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota sukabumi  | Targ. SPM | Targ. IKK | Target Indikator lainnya | Satuan % | Target Renstra Sekretariat DPRD Tahun Ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- |      |      |      |      |
|----|---|-----------|-----------|--------------------------|----------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |   |           |           |                          |          | 2014                                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1  | 2   | 3         | 4         | 5                        | 6        | 7   | 8    | 9    | 10   | 11   | 12                          | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                           | 18   | 19   | 20   | 21   |
| 1  | Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD  |           |           |                          |          | 100 %                                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,00                         | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2  | Tersusun dan terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan |           |           |                          |          | 100 %                                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,00                         | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3  | Terintegrasinya Program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan   |           |           |                          |          | 100 %                                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,00                         | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Sumber: Bagian Program & Keuangan Sekretariat DPRD

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari ketiga indikator tersebut dapat dicapai 100% realisasi kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat.

Tabel 2.9.B ...

Tabel 2.9.B (T.C23) Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

| No | Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi SKPD                       | Target SPM | Target IKK | target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD tahun ke - |      | Realisasi Capaian Tahun ke - |      | Rasio Capaian pada tahun ke - (%) |      |
|----|--|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|------|-----------------------------------|------|
|    |  |            |            |                          | 2019                           | 2020 | 2019                         | 2020 | 2019                              | 2020 |
| 1  | 2  | 3          | 4          | 5                        | 6                              | 7    | 8                            | 9    | 10                                | 11   |
| 1  | Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel          | 100%       |            |                          | 100%                           | 100% | 100%                         | 100% | 100%                              | 100% |
| 2  | Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD |            |            |                          | 100%                           | 100% | 100%                         | 100% | 100%                              | 100% |
| 3  | Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan perda                     |            |            |                          | 100%                           | 100% | 100%                         | 100% | 100%                              | 100% |
| 4  | Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran               |            |            |                          | 100%                           | 100% | 100%                         | 100% | 100%                              | 100% |

Sumber : Bagian Umum & Keuangan Sekretariat DPRD

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari ketiga indikator tersebut dapat dicapai 100% realisasi kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat.

Tabel 2.10.a (T.C.24.)  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

| Uraian ***)  | Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-n |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |       |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|------|------|-----------------------|-------|
|  | 1                       | 2             | 3             | 4             | 5             | 1                                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                     | 2     |
|  | 2014                    | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2014                              | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Angg.                 | Rls.  |
| 1  | 2                       | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                 | 8             | 9             | 10            | 11            | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18    |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 3.125.681.000           | 1.816.746.000 | 2.109.103.900 | 2.586.193.400 | 2.173.281.450 | 3.125.681.000                     | 1.816.746.000 | 2.109.103.900 | 2.586.193.400 | 2.173.281.450 | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,09                 | -0,09 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 7.000.000               | 6.500.000     | 6.000.000     | 6.000.000     | 6.000.000     | 7.000.000                         | 6.500.000     | 6.000.000     | 6.000.000     | 6.000.000     | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04                 | -0,04 |
| Penyedlaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | -                       | 237.540.000   | 143.100.000   | 176.100.000   | 176.100.000   | -                                 | 237.540.000   | 143.100.000   | 176.100.000   | 176.100.000   | -  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -                     | -     |
| Penyediaan Jasa peralatan & perlengkapan kantor        | 268.971.000             | 37.190.000    | 36.380.000    | 9.230.000     | 79.380.000    | 268.971.000                       | 37.190.000    | 36.380.000    | 9.230.000     | 79.380.000    | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,26                 | -0,26 |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                  | -                       | 25.680.000    | 69.091.900    | 155.878.400   | 194.228.400   | -                                 | 25.680.000    | 69.091.900    | 155.878.400   | 194.228.400   | -  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -                     | -     |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                      | 25.716.000              | 37.246.000    | 25.246.000    | 97.630.000    | 170.477.050   | 25.716.000                        | 37.246.000    | 25.246.000    | 97.630.000    | 170.477.050   | 1,00   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60                  | 0,60  |

| 1   | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17    | 18    |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                                 | 115.650.00 | 76.750.00  | 71.000.00  | 77.300.00  | 80.400.00  | 115.650.00 | 76.750.00  | 71.000.00  | 77.300.00  | 80.400.00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,09 | -0,09 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 51.810.00  | 64.915.00  | 66.574.00  | 59.780.00  | 73.556.00  | 51.810.00  | 64.915.00  | 66.574.00  | 59.780.00  | 73.556.00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09  | 0,09  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                 | 119.175.00 | 191.169.00 | 224.754.00 | 209.590.00 | 150.630.00 | 119.175.00 | 191.169.00 | 224.754.00 | 209.590.00 | 150.630.00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | 1,00 | 0,06  | 0,06  |
| Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30.209.00  | 23.540.00  | 29.754.00  | 27.090.00  | 19.490.00  | 30.209.00  | 23.540.00  | 29.754.00  | 27.090.00  | 19.490.00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,10 | -0,10 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 87.705.00  | 81.660.00  | 82.200.00  | 109.080.00 | 99.880.00  | 87.705.00  | 81.660.00  | 82.200.00  | 109.080.00 | 99.880.00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03  | 0,03  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | 351.809.00 | 411.516.00 | 602.664.00 | 630.040.00 | 631.465.00 | 351.809.00 | 411.516.00 | 602.664.00 | 630.040.00 | 631.465.00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,16  | 0,16  |
| Penyediaan Makanan dan Minuman  | 105.125.00 | 121.500.00 | 121.500.00 | 121.500.00 | 122.250.00 | 105.125.00 | 121.500.00 | 121.500.00 | 121.500.00 | 122.250.00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04  | 0,04  |



| 1  | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           | 7             | 8             | 9           | 10          | 11          | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17    | 18    |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah               | 852.640.000   | 472.740.000   | 602.040.000 | 829.215.000 | 291.665.000 | 852.640.000   | 472.740.000   | 602.040.000 | 829.215.000 | 291.665.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,24 | -0,24 |
| Penyediaan Jasa Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD | 857.071.000   | -             | -           | 293.200.100 | -           | 857.071.000   | -             | -           | 293.200.100 | -           | 1,00 | -    | -    | 1,00 | -    | -1,00 | -1,00 |
| Penyediaan Jasa Keamanan Gedung kantor                             | 48.800.000    | 28.800.000    | 28.800.000  | 77.760.000  | 77.760.000  | 48.800.000    | 28.800.000    | 28.800.000  | 77.760.000  | 77.760.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12  | 0,12  |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  | 1.937.302.500 | 1.515.297.000 | 900.030.500 | 887.734.000 | 663.820.200 | 1.937.302.500 | 1.515.297.000 | 900.030.500 | 887.734.000 | 663.820.200 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,23 | -0,23 |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                               | 54.286.000    | 310.945.000   | 128.000.000 | 132.820.000 | 95.820.000  | 54.286.000    | 310.945.000   | 128.000.000 | 132.820.000 | 95.820.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,15  | 0,15  |
| Pengadaan Peralatan gedung kantor                                  | 131.254.000   | 117.582.000   | -           | -           | -           | 131.254.000   | 117.582.000   | -           | -           | -           | 1,00 | 1,00 | -    | -    | -    | -1,00 | -1,00 |
| Pengadaan Mebeuleur  | 196.927.000   | 180.227.000   | 39.000.000  | -           | -           | 196.927.000   | 180.227.000   | 39.000.000  | -           | -           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -    | -    | -1,00 | -1,00 |
| Pengadaan Alat-alat Studio dan komunikasi                          | 15.217.000    | 54.312.000    | -           | -           | 57.993.000  | 15.217.000    | 54.312.000    | -           | -           | 57.993.000  | 1,00 | 1,00 | -    | -    | 1,00 | 0,40  | 0,40  |

| 1  | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17    | 18    |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor               | 181.685.000 | 194.447.000 | 157.586.500 | 138.750.000 | 110.290.000 | 181.685.000 | 194.447.000 | 157.586.500 | 138.750.000 | 110.290.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,12 | -0,12 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan               | 446.386.500 | 393.780.000 | 262.940.000 | 286.060.000 | 307.260.000 | 446.386.500 | 393.780.000 | 262.940.000 | 286.060.000 | 307.260.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,09 | -0,09 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 372.900.000 | 264.004.000 | 312.504.000 | 330.104.000 | 92.457.200  | 372.900.000 | 264.004.000 | 312.504.000 | 330.104.000 | 92.457.200  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,29 | -0,29 |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                | 538.647.000 | -           | -           | -           | -           | 538.647.000 | -           | -           | -           | -           | 1,00 |      |      |      |      | -     | -     |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur                  | 143.485.000 | 117.829.000 | 153.419.000 | 284.690.000 | 449.000.000 | 143.485.000 | 117.829.000 | 153.419.000 | 284.690.000 | 449.000.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,33  | 0,33  |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya        | 143.485.000 | 117.829.000 | 153.419.000 | 284.690.000 | 449.000.000 | 143.485.000 | 117.829.000 | 153.419.000 | 284.690.000 | 449.000.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,33  | 0,33  |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur     |             |             |             |             | 905.100.000 |             |             |             |             | 905.100.000 |      |      |      |      | 1,00 | -     | -     |
| Optimalisasi Kemampuan Aparatur                        |             |             |             |             | 905.100.000 |             |             |             |             | 905.100.000 |      |      |      |      | 1,00 | -     | -     |

| 1   | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja                 | 19.000.000 | 19.000.000 | 27.731.000 | 33.356.000 | 53.356.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 27.731.000 | 33.356.000 | 53.356.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,29 | 0,29 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD             | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.321.000 | 10.321.000 | 10.321.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.321.000 | 10.321.000 | 10.321.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 0,01 |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran  | 3.000.000  | 3.000.000  | 52.620.000 | 7.495.000  | 7.495.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 52.620.000 | 7.495.000  | 7.495.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,26 | 0,26 |
| Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran                                   | 3.000.000  | 3.000.000  | 5.620.000  | 7.495.000  | 7.495.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 5.620.000  | 7.495.000  | 7.495.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,26 | 0,26 |
| Penyusunan laporan Akhir Tahun  | 3.000.000  | 3.000.000  | 6.170.000  | 8.045.000  | 8.045.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 6.170.000  | 8.045.000  | 8.045.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| Penyusunan laporan dan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) SKPD |            |            |            |            | 20.000.000 |            |            |            |            | 20.000.000 |      |      |      |      | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1   | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17    | 18    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                                    | 14.579.129.500 | 15.512.730.000 | 15.416.015.250 | 17.814.326.250 | 18.481.742.000 | 14.579.129.500 | 15.512.730.000 | 15.416.015.250 | 17.814.326.250 | 18.481.742.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06  | 0,06  |
| Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | 2.553.632.500  | 3.080.577.000  | 3.451.697.000  | 3.682.504.500  | 4.078.255.000  | 2.553.632.500  | 3.080.577.000  | 3.451.697.000  | 3.682.504.500  | 4.078.255.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12  | 0,12  |
| Hearing/Dialo g dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/T okoh Agama | 43.278.000     | 61.650.000     | 32.245.000     | 57.720.000     | 37.170.000     | 43.278.000     | 61.650.000     | 32.245.000     | 57.720.000     | 37.170.000     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04 | -0,04 |
| Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD   | 267.740.000    | 229.804.000    | 124.573.000    | 158.455.000    | 3.718.155.000  | 267.740.000    | 229.804.000    | 124.573.000    | 158.455.000    | 3.718.155.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,93  | 0,93  |
| Rapat-rapat Paripurna   | 548.250.000    | 536.500.000    | 319.890.000    | 449.760.000    | 397.195.000    | 548.250.000    | 536.500.000    | 319.890.000    | 449.760.000    | 397.195.000    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,08 | -0,08 |
| Kegiatan Reses  | 649.295.000    | 1.354.590.000  | 1.784.156.250  | 1.973.300.000  | 2.084.475.000  | 649.295.000    | 1.354.590.000  | 1.784.156.250  | 1.973.300.000  | 2.084.475.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34  | 0,34  |
| Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah  | 66.890.000     | 62.520.000     | 35.250.000     | 46.200.000     | 30.800.000     | 66.890.000     | 62.520.000     | 35.250.000     | 46.200.000     | 30.800.000     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,18 | -0,18 |

| 1  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17    | 18    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah            | 7.290.010.000  | 6.938.480.000  | 6.888.280.000  | 7.558.874.750  | 3.902.730.000  | 7.290.010.000  | 6.938.480.000  | 6.888.280.000  | 7.558.874.750  | 3.902.730.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,14 | -0,14 |
| Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                  | 2.213.430.000  | 2.171.910.000  | 1.640.910.000  | 1.578.710.000  | 1.337.460.000  | 2.213.430.000  | 2.171.910.000  | 1.640.910.000  | 1.578.710.000  | 1.337.460.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,12 | -0,12 |
| Peningkatan pengembangan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD | 646.164.000    | 702.680.000    | 898.790.000    | 1.283.868.000  | 1.827.400.000  | 646.164.000    | 702.680.000    | 898.790.000    | 1.283.868.000  | 1.827.400.000  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30  | 0,30  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                         | 93.020.000     | 100.725.000    | 105.761.250    | 97.165.000     | 55.695.000     | 93.020.000     | 100.725.000    | 105.761.250    | 97.165.000     | 55.695.000     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,12 | -0,12 |
| Rapat-rapat Fraksi   | 207.420.000    | 273.294.000    | 240.224.000    | 318.224.000    | 318.224.000    | 207.420.000    | 273.294.000    | 240.224.000    | 318.224.000    | 318.224.000    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11  | 0,11  |
| Pembahasan Rancangan Non Peraturan Daerah                        |                |                |                | 609.545.000    | 694.183.000    | -              | -              |                | 609.545.000    | 694.183.000    |      |      |      | 1,00 | 1,00 | -     | -     |
| Jumlah Keseluruhan   | 19.804.598.000 | 18.981.602.000 | 18.606.299.650 | 21.606.299.650 | 22.726.299.650 | 19.804.598.000 | 18.981.602.000 | 18.606.299.650 | 21.606.299.650 | 22.726.299.650 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04  | 0,04  |

Sumber: Sub Bagian Program & Keuangan Sekretariat DPRD

Dari tabel di atas dapat dilihat target dan realiasi anggaran Sekretariat dari Tahun 2014 – 2018 terdapat 6 (Enam) program dan 42 (Empat puluh dua) kegiatan, pada umumnya untuk capain realisasi anggaran hampir 100% dapat terserap.

Tabel 2.10.b ...

Tabel 2.10.b (T.C.24.)  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

| Uraian ***)  | Anggaran Pada Tahun ke - |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - |               | Rasio Antara realisasi dan Anggaran Tahun ke - |           | Rata-rata Pertumbuhan |          |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|-----------|-----------------------|----------|
|  | 2019                     | 2020          | 2019                               | 2020          | 2019   | 2020      | Angg.                 | Rls.     |
| 1  | 2                        | 3             | 4                                  | 5             | 6  | 7         | 8                     | 9        |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 2.559.310.400            | 2.255.042.400 | 2.559.310.400                      | 2.129.811.411 | 1  | 0,944466  | 1,944466              | 0,16204  |
| Penyediaan jasa surat menyurat                         | 3.600.000                | 1.584.000     | 3.600.000                          | 1.584.000     | 1  | 1         | 2                     | 0,166667 |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 127.200.000              | 114.760.000   | 127.200.000                        | 103.090.846   | 1  | 0,8983169 | 1,8983169             | 0,158193 |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor           | 228.980.000              | 21.730.000    | 228.980.000                        | 8.500.000     | 1  | 0,3911643 | 1,3911643             | 0,11593  |
| penyediaan jasa administrasi keuangan                  | 251.423.400              | 440.760.000   | 251.423.400                        | 367.911.997   | 1  | 0,8347218 | 1,8347218             | 0,152893 |
| penyediaan jasa kebersihan kantor                      | 141.630.000              | 132.650.000   | 141.630.000                        | 132.168.664   | 1  | 0,9963714 | 1,9963714             | 0,166364 |
| penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja              | 88.700.000               | 41.403.200    | 88.700.000                         | 41.111.000    | 1  | 0,9929426 | 1,9929426             | 0,166079 |
| penyediaan alat tulis kantor                           | 81.331.000               | 78.680.600    | 81.331.000                         | 78.680.600    | 1  | 1         | 2                     | 0,166667 |

| 1  | 2             | 3           | 4           | 5           | 6        | 7         | 8         | 9            |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 103.630.000   | 105.304.000 | 103.630.000 | 105.047.000 | 1        | 0,9975594 | 1,9975594 | 0,166<br>463 |
| penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 18.490.000    | 15.862.600  | 18.490.000  | 14.428.883  | 1        | 0,9096165 | 1,9096165 | 0,159<br>135 |
| penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 109.080.000   | 109.080.000 | 109.080.000 | 96.470.000  | 1        | 0,8843968 | 1,8843968 | 0,157<br>033 |
| penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 150.140.000   | 375.975.000 | 150.140.000 | 366.135.000 | 1        | 0,973828  | 1,973828  | 0,164<br>486 |
| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan         | 638.356.000   | 528.060.000 | 638.356.000 | 528.050.000 | 1        | 0,9999811 | 1,9999811 | 0,166<br>665 |
| penyediaan makanan dan minuman                                   | 121.450.000   | 57.902.500  | 121.450.000 | 57.585.000  | 1        | 0,9945166 | 1,9945166 | 0,166<br>21  |
| rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah           | 484.740.000   | 231.290.500 | 484.740.000 | 229.048.421 | 1        | 0,9903062 | 1,9903062 | 0,165<br>859 |
| Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor                           | 10.560.000    |             | 10.560.000  |             | 1        | -         | -         | -            |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .              | 1.553.765.000 | 325.275.400 | 1642483000  | 281.426.176 | 1,057099 | 115,5811  | 116,6382  | 9,719<br>85  |

| 1  | 2             | 3           | 4             | 5           | 6 | 7         | 8         | 9            |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---|-----------|-----------|--------------|
| Pengadaan Mobil Jabatan                                | 353.200.000   |             | 353200000     |             | 1 | -         |           |              |
| Pengadaan Mebeleur                                     | 126.820.000   | ,-          | 126.820.000   | ,-          | 1 | -         |           |              |
| Pengadaan Alat Alat Studio dan komunikasi              | 284.885.000   | ,           |               |             |   |           |           |              |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                   | 192.310.000   |             | 192.310.000   |             | 1 | -         |           |              |
| pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 71.210.000    | 155.470.000 | 71.210.000    | 154.132.645 | 1 | 100,86766 | 101,86766 | 8,488<br>972 |
| pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan               | 330.820.000   | 97.000.000  | 330.820.000   | 61.993.095  | 1 | 156,46904 | 157,46904 | 13,12<br>242 |
| Rehabilitasi gedung akntor                             | 194.520.000   |             | 194.520.000   |             | 1 | -         | -         | -            |
| pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 88718000      | 72.805.400  | 88718000      | 65.300.436  | 1 | 111,49298 | 112,49298 | 9,374<br>415 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur                  | 455.810.000   | 135.845.000 | 455.810.000   | 135.845.000 | 1 | 1         | 2         | 0,166<br>667 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya        | 455.810.000   | 135.845.000 | 455.810.000   | 135.845.000 | 1 | 1         | 2         | 0,166<br>667 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur     | 1.118.980.600 | 457.847.750 | 1.118.980.600 | 453.099.171 | 1 | 0,989628  | 1,9896285 | 0,165<br>802 |



| 1   | 2              | 3              | 4              | 5              | 6       | 7         | 8         | 9            |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Optimalisasi Kemampuan Aparatur   | 1.118.980.600  | 457.847.750    | 1.118.980.600  | 453.099.171    | 1       | 101,04802 | 102,04802 | 8,504<br>002 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja                 | 18.867.000     | 40.450.600     | 16.736.000     | 19.509.000     | 1       | 207,3433  | 208,23033 | 17,35<br>253 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD             | 11.580.000     | 28.471.600     | 9.500.000      | 7.580.000      | 0,82038 | 375,61478 | 376,43516 | 31,36<br>96  |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran  | ,-             | ,-             |                | ,-             |         |           |           |              |
| Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran                                   | ,-             | ,-             |                | ,-             |         |           |           |              |
| Penyusunan laporan Akhir Tahun  | 661.000        | 11.979.000     | 610000         | 11.929.000     | 108     | 100,41915 | 209       | 17           |
| Penyusunan laporan dan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) SKPD | 6.626.000      | ,-             | 6626000        | ,-             | 1       | ,-        | -         | -            |
| Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                    | 18.717.618.500 | 20.726.897.810 | 18.717.618.500 | 19.793.012.506 | 1       | 0,954943  | 1,954943  | 0,162<br>91  |

| 1   | 2             | 3             | 4             | 5             | 6 | 7         | 8         | 9            |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------|-----------|--------------|
| pembahasan rancangan peraturan daerah   | 5.020.237.500 | 3.825.247.843 | 5.020.237.500 | 3.041.936.125 | 1 | 125,75043 | 126,75043 | 10,56<br>254 |
| hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | 36.450.000    | 43.365.000    | 36.450.000    | 43.297.000    | 1 | 100,15705 | 101,15705 | 8,429<br>755 |
| Rapat-rapat paripurna   | 436.350.000   | 241.220.000   | 436.350.000   | 218.397.160   | 1 | 110,45015 | 111,45015 | 9,287<br>513 |
| kegiatan reses  | 1.178.370.000 | 987.150.000   | 1.178.370.000 | 987.000.000   | 1 | 100,0152  | 101,0152  | 8,417<br>933 |
| peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD   | 2.478.780.000 | 774.074.000   | 2.478.780.000 | 771.610.928   | 1 | 100,31921 | 101,31921 | 8,443<br>268 |
| sosialisasi peraturan perundang undangan  | ,-            | ,-            | ,-            |               |   |           |           |              |
| peningkatan pengembangan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD                                | 1.560.458.000 | 698.562.000   | 1.560.458.000 | 697.230.400   | 1 | 100,19098 | 101,19098 | 8,432<br>582 |
| rapat - rapat fraksi  | 313.940.000   | 396.280.000   | 313.940.000   | 395.578.800   | 1 | 1         | 2         | 0,166<br>519 |
| pembahasan non raperda  | 991.533.000   | 1.789.188.000 | 991.533.000   | 1.710.695.273 | 1 | 1         | 2         | 0,163<br>011 |
| Pengawasan pemerintah di bidang Hukum dan pemerintahan/komisi I                                 | 1.287.950.000 | 2.455.500.000 | 1.287.950.000 | 2.444.971.549 | 1 | 1         | 2         | 0,166<br>309 |

| 1  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6 | 7 | 8 | 9            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|--------------|
| Pengawasan pemerintahan diBidang Ekonomi, keuangan dan Pembangunan/komisi II | 1.624.850.000  | 2.558.450.000  | 1.624.850.000  | 2.541.482.422  | 1 | 1 | 2 | 0,166<br>114 |
| pengawasan pemerintahan dibidang kesejahteraan /komisi III                   | 1.569.550.000  | 2.385.144.217  | 1.569.550.000  | 2.379.799.599  | 1 | 1 | 2 | 0,166<br>48  |
| pembahasan kebijakan Anggaran/badan Anggaran                                 | 1.007.930.000  | 2.353.067.000  | 1.007.930.000  | 2.352.920.357  | 1 | 1 | 2 | 0,166<br>661 |
| penetapan dan penyusunan agenda DPRD/ Badan Musyawarah                       | 540.700.000    | 1.229.329.750  | 540.700.000    | 1.228.219.675  | 1 | 1 | 2 | 0,166<br>591 |
| pembahasan penegakan tata tertib dan kode etik DPRD/Badan Kehormatan         | 242.650.000    | 298.650.000    | 242.650.000    | 296.254.192    | 1 | 1 | 2 | 0,165<br>998 |
| Fasilitas Tugas pimpinan DPRD  | 427.870.000    | 691.670.000    | 427.870.000    | 683.619.026    | 1 | 1 | 2 | 0,165<br>697 |
|  | 24.424.351.500 | 23.941.358.960 | 24.510.938.500 | 22.812.703.264 |   |   |   |              |

Sumber: Sub Bagian Program & Keuangan Sekretariat DPRD

Dari tabel di atas dapat dilihat target dan realiasi anggaran Sekretariat dari Tahun 2019 – 2020 terdapat 6 (Enam) program dan 42 (Empat puluh dua) kegiatan, pada umumnya untuk capain realisasi anggaran hampir 100% dapat terserap.

2.5. Tantangan ...

## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha mendapatkan peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanannya. Dalam proses peningkatan pelayanan tersebut Sekretariat mendapatkan tantangan-tantangan yang timbul dan dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

### A. Kekuatan (*Strengths*)

Sekretariat memiliki potensi yang berfungsi sebagai kekuatan:

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai;
2. Potensi terobosan dan leadership yang tinggi yang menunjang reformasi birokrasi;
3. Tersedianya tata tertib dan kode etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
4. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat dengan DPRD.

### B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kompetensi sumber daya Aparatur Sekretariat yang belum optimal. kualifikasi pendidikan perlu ditingkatkan karena tuntutan kebutuhan organisasi nampaknya sangat diperlukan peningkatan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia. Hal ini berimplikasi terhadap lemahnya produk-produk tanggapan seperti pembuatan pemandangan umum, dan lain-lain laporan DPRD yang dideskripsikan oleh pihak Sekretariat.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.

### C. Tantangan (*treats*)

Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD maka tantangan dapat mendorong peningkatan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD, ada beberapa tantangan (*treats*) yang dihadapi yaitu:

1. seringnya terjadi perubahan kebijakan nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. kualitas sumber daya manusia yang ada;
3. terbatasnya kemampuan sumber daya Perangkat Daerah dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi; dan
4. Rendahnya kepedulian DPRD terhadap tuntutan masyarakat.

### D. Peluang (*opportunities*)

1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur; dan
5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

BAB III  
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat

Sekretariat merupakan salah satu perangkat yang membantu tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

Bagian ini meyajikan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat terkait dengan visi, misi serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berdasarkan RPJMD Tahun 2018-20123.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Daerah.

**“Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera”**

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Perwujudan Visi RPJMD

| <b>Visi</b>  | <b>Pilar-Pilar Visi</b> | <b>Penjelasan Pilar-Pilar Visi</b>  |
|--|-------------------------|---|
| Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius Nyaman dan Sejahtera | Religius                | Pembangunan ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | Nyaman    | Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Daerah pun menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas  |
|  | Sejahtera | Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara adil. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi |

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskanlah misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Pemerintah Daerah, adalah:

1. mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau (*good governance*).

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah Misi ke empat: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan inovatif.

Tujuan: 

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.

Sasaran: 

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tugas dan Fungsi Sekretariat yang relevan untuk misi ke empat sebagai berikut:  

1. Peningkatan fasilitasi fungsi pembentukan peraturan Daerah; dan
2. Peningkatan fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Sehubungan dengan Perubahan Renstra Sekretariat tidak berkaitan langsung dengan perubahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, maka tidak terdapat faktor-faktor hambatan dalam pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.4. Telaahan ...

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sekretariat sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai lembaga legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan RTRW. Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Daerah, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wilayah pelayanan DPRD dalam ruang lingkup masyarakat Daerah sebagai wakil rakyat dalam menampung aspirasi masyarakat.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat ialah perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sekretariat sesuai tingkat kompetensi yang dibutuhkan sehingga memunculkan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal kepada para anggota DPRD dengan menghasilkan tertib administrasi dan meningkatkan kinerja DPRD.

Untuk memetakan permasalahan serta menentukan solusi dan faktor pendukung maka dibuat matrik berupa analisis *SWOT* yang menjabarkan faktor-faktor dari pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut:

#### 3.5.1 Kekuatan Internal (Strength)

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
2. Tersedianya tata tertib DPRD yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat;
3. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat dengan DPRD;
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup; dan
5. Kedudukan Sekretariat lebih strategis dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### 3.5.2 Kelemahan (Weakness)

1. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat yang belum optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Terbatasnya ruang rapat DPRD; dan
4. Kurangnya sarana prasarana di setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

#### 3.5.3 Peluang (Opportunities)

1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;

3. semakin ...

3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur; dan
5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

#### 3.5.4 Tantangan Eksternal (Threats)

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Kualitas sumber daya manusia yang ada;
3. Terbatasnya kemampuan sumber daya Perangkat Daerah dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi; dan
4. Rendahnya kepedulian (*responsibility*) DPRD terhadap tuntutan masyarakat.

#### 3.5.5 Pilihan Langkah Strategis

##### 3.5.5.1. Langkah Strategis S-O

1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat, pemanfaatan anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tenaga ahli.
2. Manfaatkan hubungan harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD, dan adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap anggota DPRD serta penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

##### 3.5.5.2. Langkah Strategis S-T

1. Jadikan keberadaan tata tertib serta terjalinnya hubungan yang harmoni antara Sekretariat dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat; dan
2. Optimalkan kedudukan Sekretariat yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan baik secara regional dan nasional.

##### 3.5.5.3. Langkah Strategis W-O

1. Tingkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

##### 3.5.5.4. Langkah Strategis S-W

1. Tingkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat untuk mewujudkan Sekretariat sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

2. Optimalkan ...



2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

### 3.5.6 Faktor-Faktor Kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan strategis organisasi melalui pendekatan analisis *SWOT/TOWS*.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis *SWOT/TOWS* terhadap faktor-faktor strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN  
JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan perubahan Renstramerupakan implementasi dari visi dan misi Wali Kota yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Perubahan Renstra Sekretariat diharapkan dapat mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya, potensi yang dimiliki oleh Sekretariat.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta menyeleraskan dengan RPJMD Tahun 2018-2023, tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat; dan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai, sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel ini:

Tabel. 4.1 A ( T.C. 25)  
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Sekretariat DPRD Kota Sukabumi 2019 - 2020

| NO | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR<br>KINERJA<br>TUJUAN/SASARAN   | TARGET KINERJA<br>TUJUAN/SASARAN<br>PADA TAHUN KE |                  |
|----|---|--|--|---|------------------|
|    |   |  |  | 2019  | 2020             |
| 1  | 2   | 6  | 7  | 9   | 10               |
| 1  | Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Kegiatan DPRD | Terpenuhinya dukungan Fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat DPRD | Tingkat Kesesuaian perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD<br><br>Tingkat Kesesuaian Target dan Realisasi Anggaran | 100%  | 90 %<br><br>85 % |

Tabel 4.1 B ...

Tabel. 4.1 B ( T.C. 25)  
 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
 Sekretariat DPRD Kota Sukabumi 2020 - 2023

| N O | TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN   | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |      |      |
|-----|--|---|--|---|------|------|
|     |  |   |  | 2021  | 2022 | 2023 |
| 1   | 2  | 6   | 7  | 9   | 10   | 11   |
| 1   | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD                                      |   | Nilai Sakip Sekretariat DPRD   | 5   | 5    | 5    |
|     |  | Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel                                     | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien | 100%  | 100% | 100% |
| 2   | Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD |   | Persentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD     | 100%  | 100% | 100% |
|     |  | Meningkatnya dukungan pelayanan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persentase fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah                | 100%  | 95%  | 100% |
|     |  |   | Persentase Fasilitasi fungsi pengawasan                                  | 100%  | 100% | 100% |
|     |  |   | Persentase Fasilitasi fungsi anggaran                                    | 100%  | 100% | 100  |

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Wujud nyata strategi adalah berupa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam proses organisasi. Dalam penetapan kebijakan ini, pimpinan atau *top leader* harus mampu memformulasikan kebijakan yang menjadi pedoman, suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga setiap pejabat dan pelaksana dalam organisasi mengetahui adanya dukungan dalam pelaksanaan tugas dan implementasi keputusan.

Pemilihan kebijakan harus selektif sehingga dapat mempertajam arti strategi sebagai pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan tidak hanya teori.

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran maka diperlukan strategi dan kebijakan untuk memformulasikan visi dan misi agar dapat dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 5.1.A (T.C. 26)  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi

VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI  
YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA  
MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif

| Tujuan  | Sasaran   | Strategi   | Kebijakan  |
|---|---|--|--|
| Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Kegiatan DPRD |   | Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Melaksanakan kegiatan Jasa Administrasi Keuangan DPRD      |
|   | Terpenuhinya dukungan Fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat | Peningkatan penyediaan Jasa Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Melaksanakan kegiatan jasa Keamanan Gedung Kantor          |
|   |   | 3. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur                                   | Melaksanakan kegiatan perlengkapan Gedung Kantor           |
|   |   | 4. Peningkatan Disiplin Aparatur   | 4. Melaksanakan kegiatan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya |
|   |   | 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                  | 5. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur    |

Tabel. 5.1 .B (T.C. 26)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi

VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI  
YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA

MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) dan inovatif

| Tujuan   | Sasaran   | Strategi   | Kebijakan   |
|--|---|--|---|
| Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat   |   | Peningkatan Penunjang urusan Pemerintah Daerah         | 1. Nilai Sakip Sekretariat  |
|  | Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel                                     |  | 2. Melaksanakan laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien   |
| Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD |   | Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 3. Melaksanakan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah. |
|  | Meningkatnya dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD |  | 4. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                           |
|  |   |  | 5. Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Perundang- undangan                      |
|  |   |  | 6. Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                           |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 7. Melaksanakan Penyusunan Tata Tertib   |
|  |  |  | 8. Melaksanakan Pembahasan Kebijakan Anggaran  |
|  |  |  | 9. Melaksanakan Pembahasan KUA dan PPAS  |
|  |  |  | 10. Melaksanakan Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan   |
|  |  |  | 11. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Anggota DPRD  |
|  |  |  | 12. Melaksanakan Pembahasan APBD   |
|  |  |  | 13. Melaksanakan APBD Perubahan  |
|  |  |  | 14. Melaksanakan Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD   |
|  |  |  | 15. Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan   |
|  |  |  | 16. Melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang, Pemerintahan dan Hukum (Komisi I)          |
|  |  |  | 17. Melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Komisi 2)                     |
|  |  |  | 18. Melaksanakan Pengawasan Pemerintah di Bidang Pemerintahan di Bidang Kesejahteraan / Komisi III |
|  |  |  | 19. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas DPRD  |
|  |  |  | 20. Melaksanakan Bimbingan Teknis DPRD   |
|  |  |  | 21. Melaksanakan Publikasi dan Dokumentasi Dewan   |
|  |  |  | 22. Melaksanakan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 23. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja DPRD (Banmus)                   |
|  |  |  | 25. Melaksanakan Kerja dalam Daerah (Hearing/Dialog)                      |
|  |  |  | 26. Melaksanakan Pelaksanaan Reses  |
|  |  |  | 27. Melaksanakan Pelaksanaan & Pengawasan Kode Etik DPRD                  |
|  |  |  | 28. Melaksanakan Kode Etik DPRD   |
|  |  |  | 29. Melaksanakan Kode Etik  |
|  |  |  | 30. Melaksanakan Fasilitasi Tugas DPRD                                    |
|  |  |  | 31. Melaksanakan Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD           |
|  |  |  | 32. Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Perjadin) |
|  |  |  | Melaksanakan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.                              |

Sumber : Bagian Umum & Keuangan Sekretariat DPRD

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat merupakan hal pendukung untuk mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Daerah berfungsi sebagai Perangkat Daerah teknis dalam bidang keamanan dan ketertiban di Daerah.

Penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang akan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan target berdasar kepada perhitungan indikator kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pendanaan indikatif yang ditetapkan merupakan proyeksi kebutuhan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.



Tabel 6.1 a ( T.C 27)

Rencana Program , kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kota Sukabumi 2019 -2020

| Tujuan  | Sasaran   | Kode                   | Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan Output)                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   |             |  |  | Perangkat Daerah penanggung jawab |
|---|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------|--|--|-----------------------------------|
|   |   |                        |  |  |                                   | Tahun 2019                                       |             | Tahun 2020                                       |  |                                   |
|   |   |                        |  |  |                                   | Target   | Rp          | Target   | Rp   |                                   |
| 1   | 2   | 3                      | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8           | 9  | 10   | 11                                |
| Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD |   |                        |  | Nilai Sakip Sekretariat DPRD   |                                   | 0.1 %  | 18,807,000  | 0.1 %  | 40,450,600                                       |                                   |
|   |   |                        |  | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien |                                   |  |             |  |  |                                   |
|   | Terwujudnya Laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel |                        |  |  |                                   |  |             |  |  |                                   |
|   |   | 4.00.4.00.02.01.01     | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                 |  |                                   |  |             |  |  | Sekretariat DPRD                  |
|   |   | 4.00.4.00.02.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah materai yang tersedia   | 1 Item                            | 300 lb materai dan 1680 lb perangko              | 3,600,000   | 300 lb materai & 1680 lb perangko                | 300 lb materai & 1680 lb perangko                |                                   |
|   |   | 4.00.4.00.02.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik    | Jumlah terbayarnya rekening, Telepon, air, Listrik dan jaringan internet | 4 Item                            | 4 line tlp, 1 sal Pam, 1 sal, listrik 2 internet | 112,200,000 | 4 line tlp, 1 sal Pam, 1 sal, listrik 2 internet | 4 line tlp, 1 sal Pam, 1 sal, listrik 2 internet |                                   |

|  |  |                        |  |  |         |  |             |             |             |  |
|--|--|------------------------|--|--|---------|--|-------------|-------------|-------------|--|
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah perlengkapan dan Peralatan Hut Kota dan HUT Kemerdekaan RI, Pelantikan Anggota DPRD Kota Sukabumi Periode 2019-2024                               | 8 Item  | 2 jenis  | 228,980,000 | 2 jenis     | 2 jenis     |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Terbayarnya anggaran gaji bulanan dan kesejahteraan lainnya untuk Tenaga THL   | 3 Item  | 13 orang   | 251,423,400 | 13 orang    | 13 orang    |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                  | Jumlah jasa kebersihan kantor  | 10 Item | 1 thn  | 141,630,000 | 1 thn       | 1 thn       |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.009 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                          | Jumlah peralatan kerja untuk 1 tahun   | 1 Item  | 75 unit  | 95,700,000  | 75 unit     | 75 unit     |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Jumlah kebutuhan ATK selama 1 tahun  | 3 Item  | 1 Tahun  | 86,331,000  | 94,964,100  | 94,964,100  |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah barang cetakan dan penggandaan  | 6 Item  | 28 jenis   | 109,630,000 | 120,593,000 | 120,593,000 |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.012 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | Jumlah kebutuhan alat listrik selama 1 tahun   | 1 Item  | 30 jenis   | 18,490,000  | 20,339,000  | 20,339,000  |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah kebutuhan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun  | 5 Item  | 13 jenis   | 152,140,000 | 167,354,000 | 167,354,000 |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | jumlah kebutuhan informasi dan publikasi yang berimplikasi positif bagi DPRD; a. surat kabar harian, b. surat kabar mingguan, c. buku Perundang-undangan | 5 Item  | 10 srt kbr harian, 17 srt kbr mngguan, 1 mjlh blnn, 54 bku | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.017 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Jumlah makanan dan minuman Tamu DPRD dan Sekretariat   | 1 Item  | 3200 porsi   | 121.450.000 | 133,595,000 | 133,595,000 |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.018 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah               | Jumlah kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah  | 3 Item  | 20 HOK rakor   | 389,365,000 | 428,499,500 | 428,499,500 |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.01.025 | Penyediaan Jasa Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD |  |         |  | -           | -           | -           |  |

|  |  |                        |  |  |          |   |             |  |             |                  |
|--|--|------------------------|--|--|----------|---|-------------|--|-------------|------------------|
|  |  |                        | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor                 | Jumlah terbiayanya petugas keamanan kantor DPRD  | 10 Orang | 10 Orang                                    | 138,536,000 | -  | -           |                  |
|  |  | 4.01.4.02.02           | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      |  |          |   | 714,898,000 |  | 824,447,800 | Sekretariat DPRD |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.02.007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                   | Jumlah perlengkapan kantor (kertas, map, tinta cartidge dll), Peralatan Dapur  | 9 Item   | 4 unit, 2 unit, 6 unit, 2 unit              | 67,310,000  | 4 unit, 2 unit, 6 unit, 2 unit                       | 74,041,000  |                  |
|  |  | 4.01.4.02.02.10        | Pengadaan Mebeleur                                     | Jumlah perlengkapan kantor yaitu Meja Rapat, Kursi Rapat   |          | 1 set, 20 buah                              | 46,820,000  | 1se 20 buah  | 51,502,000  |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.02.018 | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi              | Jumlah <i>running teks</i> , sistem aplikasi Teks  | 6 Item   |   |             | 6 unit   | 38,060,000  |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.02.022 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor               | Jumlah Gedung Kantor terpelihara   | 4 Item   | 1 gedung                                    | 71.210.000  | 1 gedung   | 78,331,000  |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.02.023 | Pemeliharaan Rutin/berkala mobil Jabatan               | jumlah mobil Jabatan terpelihara   | 3 Item   | 7kendrn roda 4                              | 330,820,000 | 7kendrn roda 4                                       | 363,902,000 |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan roda 4 kendaraan roda 2 terpelihara   | 4 Item   | 2 unit 7 unit                               | 88,718,000  | 2 unit 7 unit  | 97,589,800  |                  |
|  |  |                        | Rehabilitas sedang / berat rumah Gedung Kantor         | Jumlah rehab ruang jaga satpol PP, rehab perbaikan atap gedung, Pasang karpet baru   |          | 3 Pekerjaan                                 | 110,020,000 | 3 Pekerjaan  | 121,022,000 |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.03     | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                  |  |          |   | 455,810,000 |  | 501,391,000 | Sekretariat DPRD |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.03.002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya        | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya : PSH Anggota Dewan periode tahun 2014- 2019, periode 2019-2024, PDH Anggota Dewan lengan panjang, PSL dewan periode 2019-2024, PSR Anggota Dewan, Pakaian adat daerah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD, atribut pangkat jabatan Sekretariat | 15 Item  | 70 stel, 35 stel, 35 stel, 35 stel, 35 stel | 455,810,000 | 70 stel, 35 stel, 35 stel, 35 stel, 13 stel, 35 stel | 501,391,000 |                  |

|  |  |                        |   |   |        |                         |                |                         |                |                  |
|--|--|------------------------|---|---|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|
|  |  | 4.00.4.00.02.01.       | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                                |   |        |                         | 981,480,600    |                         | 809,497,260    | Sekretariat DPRD |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.010    | Peningkatan Kemampuan Aparatur  | Terlaksananya kegiatan Bintel dan Asdeksi Nasional dan Asdeksi Korwil Jabar                 | 4 Item | 10 Kegiatan             | 981,480,600    | 10 Kegiatan             | 809,497,260    |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.06     | PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN                        |   |        |                         | 8,867,000      |                         | 9,753,700      | Sekretariat DPRD |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD            | Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan realisasi Sekretariat DPRD DPRD dan renja           | 4 Item | 24 buku Laporan Kinerja | 1,750,000      | 24 buku Laporan Kinerja | 1,738,000      |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.06.002 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran  | Tersedianya Informasi dan Gambaran Anggaran di Sekretariat DPRD sebagai Akuntabilitas kerja | 3 Item |                         | 1,500,000      | 1 Buku                  | 1,000,000      |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.06.003 | Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran                                 | Realisasi untuk penggunaan Anggaran Smester I   | 3 Item |                         | 1,500,000      | 1 Buku                  | 1,000,000      |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.06.004 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun   | tersedianya buku laporan Akhir Tahun  | 4 Item | 10 buku                 | 1,500,000      | 10 buku                 | 727,100        |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.06.005 | Penyusunan laporan dan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) SKPD | Dokumen Penyelenggaraan SPIP Sekretariat DPRD   | 4 Item | 4 dokumen               | 2,617,000      | 4 dokumen               | 5,288,600      |                  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.06.004 | PROGRAM PERENCANAAN dan PENGANGGARAN  |   |        |                         |                |                         |                | Sekretariat DPRD |
|  |  |                        | penyusunan renja  | tersedianya buku laporan Renja  | 1 Buku | 1 Buku                  |                | 1 Buku                  |                |                  |
|  |  |                        | penyusunan Renstra  | 2 Dokumen   | 1 Buku |                         |                |                         |                |                  |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.15     | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT                           |   |        |                         | 19.231.428.500 | 100%                    | 17,755,542,750 | Sekretariat DPRD |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.15.001 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | Jumlah Raperda yang berasal dari DPRD dan Kepala Daerah                                     | 8 Item | 17 Perda                | 4,270,237,500  | 17 Perda                | 3,500,000,000  |                  |

|  |  |                               |   |   |         |                                    |               |                                    |               |  |
|--|--|-------------------------------|---|---|---------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|
|  |  |                               |   | mendapatkan persetujuan bersama ditetapkan menjadi perda  |         |                                    |               |                                    |               |  |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.01.15.00<br>2 | Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama | Jumlah dokumen Hasil Kegiatan <i>hearing/ Dialog</i> dengan <i>stake holder</i>   | 2 Item  | 14 Kegiatan                        | 36,450,000    | 14 Kegiatan                        | 40,095,000    |  |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.01.15.00<br>4 | Rapat-rapat Paripurna   | Jumlah kegiatan Rapat-rapat Paripurna, risalah rapat paripurna  | 7 Item  | 51 Kegiatan, 5 buku / risalah      | 436.30.000    | 51 Kegiatan, 5 buku/ risalah       | 479,985,000   |  |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.01.15.00<br>5 | Kegiatan Reses  | Kegiatan Reses masa persidangan ke -2 tahun sidang 2018-2019 untuk anggota DPRD periode 2014-2019, kegiatan Reses masa persidangan ke-3 tahun sidang 2018-2019 untuk anggota DPRD periode 2014-2019, kegiatan reses Masa Persidangan Ke-I Tahun sidang 2019-2024 untuk anggota DPRD periode 2019-2024, laporan hasil kegiatan Reses | 8 Item  | 3 x reses. 105 laporan             | 1,722,450,000 | 3 x reses. 105 laporan             | 1,350,000,000 |  |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.01.15.00<br>7 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan Anggota DPRD                               | Kegiatan Pendalaman Tugas anggota DPRD periode 2014-2019, Kegiatan Orientasi Anggota DPRD periode 2019-2024, Kegiatan Pendalaman tugas anggota DPRD periode tahun 2019-2024   | 14 Item | 2 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan | 2,478,780,000 | 2 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan | 1,726,000,000 |  |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.01.15.00<br>8 | Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan                                 | Jumlah kegiatan Sosialisasi perda, produk hukum dan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD  | 1 Item  | 4 kgtn, 4 kecamatan                | 26,530,000    | 4 kgtn, 4 kecamatan                | 29,183,000    |  |

|  |  |                           |  |  |         |   |               |   |               |  |
|--|--|---------------------------|--|--|---------|---|---------------|---|---------------|--|
|  |  | 4.00.02.4.00.02.01.15.10  | Peningkatan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD | Jumlah sarana informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD terdiri dari: website DPRD, dokumentasi kegiatan DPRD (foto dan video), Sosialisasi dan promosi kgtm DPRD melalui Media cetak dan elektronik, Tabloid/buletin DPRD, Buku Profil DPRD dan Sekretariat, buku sejarah Kota Sukabumi   | 1 Item  | 1 website, 1 website JDIH 2640 lbr dan 12 video 763 kali, 350 eksplar | 1,600,458,000 | 1 website, 1 website JDIH 2640 lbr & 12 video 763 kali, 350 eksplar | 1,104,089,450 |  |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.01.15.011 | Rapat-trapat Fraksi  | Jumlah kegiatan rapat-rapat Fraksi, Tenaga Ahli Fraksi   | 5 Item  | 72 kgtn rapat fraksi 8 tenaga ahli fraksi                             | 313,940,000   | 72 kgtn rapat fraksi 8 tenaga ahli fraksi                           | 345,334,000   |  |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.01.15.011 | Pembahasan Rancangan Non Peraturan Daerah                        | Jumlah pembahasan Pansus Non Raperda   | 15 Item | 2 kegtn   | 991,533,000   | 2 kegtn   | 1,090,686,300 |  |
|  |  | 4.00.02.4.00.02.01.15.013 | Pengawasan Pemerintah di Bidang Hukum dan Pemerintahan/ Komisi I | Jumlah Pembahasan terhadap raperda dan rancangan Keputusan DPRD, terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan raperda dan APBD sesuai ruang lingkup tugas Komisi I, terselesainya masalah yang disampaikan Kepala Daerah/masyarakat ke DPRD dibidang Hukum dan Pemerintahan, menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dibidang Hukum dan Pemerintahan | 4 Item  | 4 kgtn, 4 kgtn, 4 kgtn, 4 kgtn  | 1,526,050,000 | 4 kgtn, 4 kgtn, 4 kgtn  | 1,678,655,000 |  |

|  |  |                        |   |  |        |                                |               |                                |               |  |
|--|--|------------------------|---|--|--------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|
|  |  | 4.00.4.00.02.01.15.XX  | Pengawasan Pemerintah di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan / Komisi II     | Jumlah Pembahasan terhadap raperda dan rancangan Keputusan DPRD, terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan raperda dan APBD sesuai ruang lingkup tugas Komisi II, terselesainya masalah yang disampaikan Kepala Daerah/masyarakat ke DPRD dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan | 3 Item | 4 kgtn, 4 kgtn, 4 kgtn, 4 kgtn | 1.818.850.000 | 4 kgtn, 4 kgtn, 4 kgtn, 4 kgtn | 2,000,735,000 |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.15.XXX | Pengawasan Pemerintah di Bidang Pemerintahan di Bidang Kesejahteraan / Komisi III | Pembahasan terhadap raperda dan rancangan keputusan DPRD, terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan raperda dan APBD sesuai ruang lingkup tugas Komisi III, terselesainya masalah yang disampaikan Kepala Daerah/masyarakat pada DPRD dibidang Kesejahteraan, menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dibidang Kesejahteraan  | 7 Item | 5 kgtn, 5 kgtn, 5 kgtn, 5 kgtn | 1,763,550,000 | 5 kgtn, 5 kgtn, 5 kgtn, 5 kgtn | 1,939,905,000 |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.15.XX  | Pembahasan Kebijakan Anggaran / Badan Anggaran                                    | Ditetapkannya KUA PPAS tepat waktu sesuai kemampuan Daerah, ditetapkannya APBD sesuai prioritas dan kemampuan daerah serta tepat waktu, ditetapkannya pertanggung jawaban yang akuntabel   |        | 3 kgtn, 3 kgtn, 3 kgtn, 3 kgtn | 1,007,930,000 | 3 kgtn, 3 kgtn, 3 kgtn, 3 kgtn | 1,108,723,000 |  |

|  |  |                       |  |  |  |                         |             |                         |             |  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|
|  |  | 4.00.4.00.02.01.15.XX | Penetapan dan Penyusunan Agenda DPRD / Badan Musyawarah                | tersusunnya agenda DPRD sesuai program kerja selama 1 tahun melalui rapat pembahasan rencana kerja tahunan, tersusunnya dan ditetapkannya agenda DPRD sesuai program kerja DPRD perbulan melalui rapat pembahasan rencana kerja bulanan, memberikan pendapat kepada pimpinan dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD melalui rapat kerja internal |  | 1 kgtn, 12 kgtn, 6 kgtn | 567,800,000 | 1 kgtn, 12 kgtn, 6 kgtn | 624,580,000 |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.15.XX | Pembahasan Penegakan Tata tertib dan Kode Etik DPRD / Badan Kehormatan | Tersusunnya agenda kerja Badan Kehormatan melalui Rapat-rapat internal BK, terlaksananya sidang BK melalui rapat sidang BK   |  | 12 kali, 12 kali        | 242,650,000 | 12 kali, 12 kali        | 266,915,000 |  |
|  |  | 4.00.4.00.02.01.15.XX | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD   | Terjalannya Koordinasi DPRD dengan Instansi lain, Tersosialisasinya keputusan DPRD, terfasilitasinya tamu-tamu DPRD  |  | 2 kgtn, 24 kgtn         | 427,870,000 | 2 kgtn, 24 kgtn         | 470,657,000 |  |



Tabel 6.1.B (T.C 27)  
Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,  
dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Tahun 2021 - 2023

| Tujuan  | Sasaran   | Kode            | Program/Kegiatan /Sub kegiatan                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub (Output)                | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |             |                |              |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                 | Unit Kerja       | Lokasi           |
|---|---|-----------------|---|---|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|
|   |   |                 |   |   | 2021                                  |                | 2022        |                | 2023         |                |   |                 |                  |                  |
|   |   |                 |   |   | Target                                | Rp             | Target      | Rp             | Target       | Rp             | Target  | Rp              |                  |                  |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel | 4.02.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 100%                                  | 33.319.364.386 | 100%        | 34.152.348.496 | 100%         | 34.423.320.204 | 100%  | 101.895.033.085 |                  |                  |
|   |   | 4.02.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 100%                                  | 41.213.850     | 100%        | 41.938.130     | 100%         | 42.776.893     | 100%  | 125.928.873     | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD |
|   |   | 4.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Renja, Dokumen FGD   | 2 exsp/buku                           | 4.999.850      | 3 exsp/buku | 4.999.850      | 30 exsp/buku | 5.099.847      | 35 exsp/buku  | 15.099.547      |                  |                  |
|   |   | 4.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | Jumlah Dokumen RKA  | 4 exp/buku                            | 5.000.000      | 31 exp/buku | 5.100.000      | 31 exp/buku  | 5.202.000      | 66 exp/buku   | 15.302.000      |                  |                  |
|   |   | 4.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA  | 2 exp/buku                            | 5.000.000      | 31 exp/buku | 5.100.000      | 31 exp/buku  | 5.202.000      | 64 exp/buku   | 15.302.000      |                  |                  |

|  |  |                 |   |  |                  |             |                  |             |                  |             |                  |               |         |         |
|--|--|-----------------|---|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------|---------|
|  |  | 4.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA   | 3 exp/b uku      | 5.000.000   | 31 exp/b uku     | 5.100.000   | 31 exp/b uku     | 5.202.000   | 65 exp/b uku     | 15.302.000    |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA   | 3 exp/b uku      | 5.000.000   | 31 exp/b uku     | 5.100.000   | 31 exp/b uku     | 5.202.000   | 65 exp/b uku     | 15.302.000    |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan capaian kinerja d dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan Rapat Laporan evaluasi kinerja ,jumlah dokumen LAKIP, LPPD,LKPJ dan SPM | 17 exp/b uku     | 10.000.000  | 17 exp/b uku     | 10.200.000  | 17 exp/b uku     | 10.404.000  | 51 exp/b uku     | 30.604.000    |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | jumlah Dokumen SPIP  | 4 exp/b uku      | 6.214.000   | 4 exp/b uku      | 6.338.280   | 4 exp/b uku      | 6.465.046   | 12 exp/b uku     | 19.017.326    |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%             | 680.084.350 | 100%             | 693.686.037 | 100%             | 693.686.037 | 100%             | 2.067.456.424 | Setwa n | Setwa n |
|  |  | 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah materai 10.000  | 195 lembar /buah | 1.000.000   | 200 lembar /buah | 1.020.000   | 200 lembar /buah | 1.020.000   | 585 lembar /buah | 3.040.000     |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jenis rekening yang dibayar: Telpon, Air, Internet   | 12 bulan         | 104.120.350 | 12 bulan         | 106.202.757 | 12 bulan         | 106.202.757 | 12 bulan         | 316.525.864   |         |         |

|  |  |                 |  |   |                                 |             |                                  |             |                                |             |                                  |               |        |        |
|--|--|-----------------|--|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------|--------|
|  |  | 4.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | 1. Jumlah belanja tabung pemadam kebakaran, bahan bakar gas non subsidi, 2. honorarium Rohaniawan, Jasa Tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan | 4 kali, 11 kgtn, 12 bulan       | 100.000.000 | 4 kali, 11 kgtn, 12 bulan        | 102.000.000 | 4 kali, 11 kgtn, 12 bulan      | 102.000.000 | 4 kali, 11 kgtn, 12 bulan        | 304.000.000   |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                   | Jumlah Pembayaran honorarium tenaga THL, BPJS Kesehatan dan Ketenagkerjaan THL  | 20 orang                        | 474.964.000 | 25 orang                         | 484.463.280 | 25 orang                       | 484.463.280 | 68 orang                         | 1.443.890.560 |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran  | 100%                            | 975.450.700 | 100%                             | 997.689.714 | 100%                           | 997.689.714 | 100%                             | 2.970.830.128 | Setwan | Setwan |
|  |  | 4.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan Material  | jumlah peralatan kantor, Peralatan: Peralatan HUT Kota Sukabumi , Hut DPRD Kota Sukabumi , Hut Republik Indonesia                               | 3 kegiatan                      | 100.000.000 | 3 kegiatan                       | 102.000.000 | 3 kegiatan                     | 102.000.000 | 9 kegiatan                       | 304.000.000   |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah tersedianya cetakan dan pengadaan  | 14 jenis, 15177 lembar, 20 buku | 90.000.000  | 14 jenis, 20000 lembar , 23 buku | 94.500.000  | 14 jenis, 20000 lembar, 23 buk | 94.500.000  | 42 jenis, 55177 lembar , 66 buku | 279.000.000   |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah tersedianya kebutuhan alat listrik dan instalansi listrik  | 14 jenis                        | 21.166.700  | 14 jenis                         | 21.590.034  | 14 jenis                       | 21.590.034  | 42 jenis                         | 64.346.768    |        |        |

|  |  |                     |  |  |                           |             |                           |             |                           |             |                             |               |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|--|--|
|  |  | 4.02.01.2.<br>06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | jumlah Alat Tulis Kantor, peralatan pendukung kebersihan kantor, Pembuatan aplikasi , Laptop Komputer, AC  | 87 jenis, 2 unit, 35 unit | 100.000.000 | 90 jenis, 2 unit, 35 unit | 102.000.000 | 90 jenis, 2 unit, 35 unit | 102.000.000 | 267 jenis, 6 unit, 105 unit | 304.000.000   |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>06.03 | Penyediaan Peralatan rumah tangga                          | Jumlah peralatan rumah tangga (gelas Cangkir, gelas minum, piring makan), Dispenser, Wearles, Tape ricoder | 3 jenis                   | 10.000.000  | 10 jenis                  | 10.200.000  | 15 jenis                  | 10.200.000  | 28 jenis                    | 30.400.000    |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah surat kabar harian dan Jumlah surat kabar mingguan  | 29 exsemplar              | 529.236.000 | 29 exsemplar              | 539.820.720 | 29 exsemplar              | 539.820.720 | 87 exsemplar                | 1.608.877.440 |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                   | jumlah makanan dan minuman Tamu DPRD dan Sekretariat dan snack tamu DPRD dan Sekretariat                   | 1665 porsi, 480 dus       | 60.000.000  | 2000 porsi, 500 dus       | 61.200.000  | 2500 porsi, 3000 dus      | 61.200.000  | 7830 porsi, 3980 dus        | 182.400.000   |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>06.09 | Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Kegiatan Konsultasi dan koordinasi keluar dan dalam Daerah  | 5 kegiatan                | 65.048.000  | 5 kegiatan                | 66.348.960  | 5 kegiatan                | 66.348.960  | 15 kegiatan                 | 197.745.920   |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor                           | Jumlah Bahan logistik yang tersedia  | -                         | -           | 1 paket                   | 10.000      | 1 paket                   | 10.000      | 2 paket                     | 20.000        |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah          | Jumlah dokumen arsip yang terpelihara  | -                         | -           | 1 kegiatan                | 10.000      | 1 kegiatan                | 10.000      | 2 kegiatan                  | 20.000        |  |  |

|  |  |                 |  |   |  |            |  |            |  |            |   |             |         |         |
|--|--|-----------------|--|---|--|------------|--|------------|--|------------|---|-------------|---------|---------|
|  |  | 4.02.01.2.06.11 | Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah | Jumlah sistem pemerintahann berbasis elektronik                                     | -  | -          | 1 paket  | 10.000     | 1 paket  | 10.000     | 2 paket   | 20.000      |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.07    | Penggadaan barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintah Daerah                 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur                        | 100%   | 55.800.000 | 100%   | 57.006.000 | 100%   | 57.006.000 | 100%  | 169.812.000 | Setwa n | Setwa n |
|  |  | 4.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah tersedianya meja rapat, Sofa, ,meja kerja , kursi kerja, lemari penyimpanan. | 2 paket, 3 set, 171 meter, 4 unit, 10 unit, 2 unit | 55.800.000 | 2 paket, 3 set, 171 meter, 4 unit, 10 unit, 2 unit | 56.916.000 | 2 paket, 3 set, 171 meter, 4 unit, 10 unit, 2 unit | 56.916.000 | 6 paket, 9 set, 513 meter, 12 unit, 30 unit, 6 unit | 169.632.000 |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan dinas atau kendaraan jabatan                  | Jumlah kendaraan eselon III layak pakai   | -  | -          | 3 Unit   | 10.000     | 3 Unit   | 10.000     | 6 Unit  | 20.000      |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan                                | jumlah kendaraan eselon IV  | -  | -          | 9 Unit   | 10.000     | 9 Unit   | 10.000     | 18 Unit   | 20.000      |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.07.03 | Pengadaan Alat besar   | Jumlah alat besar   | -  | -          | 1 Unit   | 10.000     | 1 Unit   | 10.000     | 2 Unit  | 20.000      |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.07.04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor   | jumlah angkutan darat tak bermotor  | -  | -          | 1 Unit   | 10.000     | 1 Unit   | 10.000     | 2 Unit  | 20.000      |         |         |
|  |  | 4.02.01.2.07.06 | Pengadaan dan Peralatan mesin Lainnya  | jumlah mesin fotocopy   | -  | -          | 1 Unit   | 10.000     | 1 Unit   | 10.000     | 2 Unit  | 20.000      |         |         |

|  |  |                     |  |   |      |                 |        |                 |        |                 |        |                   |        |        |
|--|--|---------------------|--|---|------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|--------|
|  |  | 4.02.01.2.<br>07.07 | Pengadaan Aset tetap lainnya   | jumlah pengadaan Aset tetap lainnya         | -    | -               | 1 Unit | 10.000          | 1 Unit | 10.000          | 2 Unit | 20.000            |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.<br>07.08 | Pengadaan Aset Tak berwujud  | jumlah pengadaan Aset Tak berwujud          | -    | -               | 1 Unit | 10.000          | 1 Unit | 10.000          | 2 Unit | 20.000            |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.<br>07.09 | Pengadaan Gedung kntor atau bangunan lainnya                                 | jumlah gedung kantor DPRD                   | -    | -               | 1 buah | 10.000          | 1 buah | 10.000          | 2 buah | 20.000            |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.<br>07.10 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | jumlah sarana dan prasarana                 | -    | -               | 1 buah | 10.000          | 1 buah | 10.000          | 2 buah | 20.000            |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.<br>09    | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah          | Persentase Pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 517.192.50<br>0 | 100%   | 527.616.35<br>0 | 100%   | 527.616.35<br>0 | 100%   | 1.572.425.20<br>0 | Setwan | Setwan |

|  |  |                     |  |   |                          |                 |                          |                 |                          |                 |                          |             |  |  |
|--|--|---------------------|--|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|--|--|
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 1. Jumlah perbaikan /instansi jaringan internet (tv kabel, jasa internet), 2. perbaikan alat kantor/rumah tangga( pompa air tangki,CCTV,genset ,handycam,instalasi internet,LCD proyektor,Mic Chaiman,Sound Sytem,TV), 3.Perbaikan Printer., 4. Perbaikan AC Ruangan, 5. Perbaikan Komputer PC/Notebook | 12 bulan,                | 85.000.000      | 12 bulan,                | 86.700.000      | 12 bulan,                | 86.700.000      | 36 bulan,                | 258.400.000 |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah terpeliharanya mobil Jabatan   | 3 unit                   | 128.486.50<br>0 | 3 unit                   | 131.056.23<br>0 | 3 unit                   | 131.056.23<br>0 | 9 unit                   | 390.598.960 |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan     | Jumlah terpeliharanya kendaraan Roda 4 dan Roda 2   | 9 roda<br>2, 6<br>roda 4 | 201.853.00<br>0 | 9 roda<br>2, 6<br>roda 4 | 205.890.06<br>0 | 9 roda<br>2, 6<br>roda 4 | 205.890.06<br>0 | 9 roda<br>2, 6<br>roda 4 | 613.633.120 |  |  |

|  |  |                     |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |  |  |
|--|--|---------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.10 | Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya             | Jumlah terpeliharanya perawatan gedung kantor                    | 1<br>gedun<br>g | 101.853.00<br>0 | 1<br>gedun<br>g | 103.890.06<br>0 | 1<br>gedun<br>g | 103.890.06<br>0 | 1<br>gedun<br>g | 309.633.120 |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.05 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah mebel yang terpelihara                                    | -               | -               | 1 Unit          | 10.000          | 1 Unit          | 10.000          | 1<br>paket      | 20.000      |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.03 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar                       | Jumlah terpeliharanya perawatan gedung kantor                    | -               | -               | 1<br>gedun<br>g | 10.000          | 1<br>gedun<br>g | 10.000          | 1<br>gedun<br>g | 20.000      |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.04 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor | Jumlah terpeliharanya perawatan alat angkutan darat tak bermotor | -               | -               | 1 Unit          | 10.000          | 1 Unit          | 10.000          | 1 Unit          | 20.000      |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.07 | Pemeliharaan aset tetap lainnya   | Jumlah terpeliharanya aset tetap                                 | -               | -               | 1 Unit          | 10.000          | 1 Unit          | 10.000          | 1 Unit          | 20.000      |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.08 | Pemeliharaan aset tak berwujud  | Jumlah terpeliharanya perawatan aset tak berwujud                | -               | -               | 1 Unit          | 10.000          | 1 Unit          | 10.000          | 1 Unit          | 20.000      |  |  |
|  |  | 4.02.01.2.<br>09.09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya                                   | Jumlah terpeliharanya perawatan gedung kantor & bangunan lainnya | -               | -               | 1<br>gedun<br>g | 10.000          | 1<br>gedun<br>g | 10.000          | 1<br>gedun<br>g | 20.000      |  |  |



|  |  |                 |   |  |            |             |   |             |   |             |   |               |            |            |
|--|--|-----------------|---|--|------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|------------|------------|
|  |  | 4.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Jumlah terpeliharanya perawatan gedung kantor dan pendukung gedung lainnya   | -          | -           | 1 Unit  | 10.000      | 1 Unit  | 10.000      | 2 Unit  | 20.000        |            |            |
|  |  | 4.02.01.2.09.12 | Pemeliharaan rehabilitasi Tanah   | Jumlah terpeliharanya perawatan tanah  | -          | -           | 1 Unit  | 10.000      | 1 Unit  | 10.000      | 2 Unit  | 20.000        |            |            |
|  |  | 4.02.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah   | 100%       | 372.887.500 | 100%  | 544.072.069 | 100%  | 560.191.172 | 100%  | 1.477.150.741 | Setwa<br>n | Setwa<br>n |
|  |  | 4.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | PDH ,atribut ,pakaian adat, Pakain Putih Hitam, pakaian olahraga , sepatu olah raga, pakaian lapangan, Sepatu Sekretariat DPRD | 0          | 0           | 55 stel,55 stel,55 stel,55 stel,55 stel,55 stel,55 buah | 71.134.569  | 55 stel,55 stel,55 stel,55 stel,55 stel,55 buah | 73.067.047  | 15 stel,15 stel,15 stel,15 stel,15 stel,15 buah | 144.201.616   |            |            |
|  |  | 4.02.01.2.05.10 | Sosialisai Peraturan Perundang undangan   | Kepesertaan Asdeksi Nasional dan Asdeksi Korwil  | 8 kegiatan | 372.887.500 | 10 kegiatan   | 372.887.500 | 10 kegiatan                                     | 384.074.125 | 30 kegiatan                                     | 1.129.849.125 |            |            |
|  |  | 4.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                    | Jumlah Bimbingan teknis Sekretariat DPRD   | 0          | 0           | 2 kegiatan  | 100.000.000 | 3 kegiatan                                      | 103.000.000 | 5 kegiatan                                      | 203.000.000   |            |            |
|  |  | 4.02.01.2.05.01 | peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai   | jumlah dokumen arsip pengolahan data   | -          | -           | 2 eksplr /doku men                                      | 10.000      | 2 eksplr /doku men                              | 10.000      | 4 eksplr /doku men                              | 20.000        |            |            |

|  |  |                 |   |  |                   |               |                    |               |                    |               |                    |                |        |        |
|--|--|-----------------|---|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------|--------|
|  |  | 4.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian                       | Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian             | -                 | -             | 2 eksplr /doku men | 10.000        | 2 eksplr /doku men | 10.000        | 4 eksplr /doku men | 20.000         |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                 | jumlah sistem informasi kepegawaian                                  | -                 | -             | 1 kegiatan         | 10.000        | 1 kegiatan         | 10.000        | 2 kegiatan         | 20.000         |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.05.05 | Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                      | jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai,  | -                 | -             | 12 kegiatan        | 10.000        | 12 kegiatan        | 10.000        | 24 kegiatan        | 20.000         |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.05.09 | Pendidilan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi           | Jumlah Pendidilan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | -                 | -             | 2 kegiatan         | 10.000        | 2 kegiatan         | 10.000        | 4 kegiatan         | 20.000         |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah  | 100%              | 4.835.487.723 | 100%               | 4.932.247.477 | 100%               | 4.932.479.395 | 100%               | 14.700.214.595 | Setwan | Setwan |
|  |  | 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD                  | 1 Tahun ( 34 ASN) | 4.827.908.723 | 1 Tahun            | 4.924.466.897 | 1 Tahun            | 4.924.466.897 | 3 Tahun            | 14.676.842.518 |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwu;an /semesteran | Jumlah dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu             | 6 exp/d okume n   | 4.800.000     | 6 exp/d okume n    | 4.896.000     | 6 exp/d okume n    | 5.042.880     | 18 buku            | 14.738.880     |        |        |

|  |  |                 |   |   |             |             |                 |             |                 |             |                 |               |        |        |
|--|--|-----------------|---|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------|--------|
|  |  | 4.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah dokumen perencanaan laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu | 6 buku      | 2.779.000   | 6 buku          | 2.834.580   | 6 buku          | 2.919.617   | 18 buku         | 8.533.197     |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN                     | Jumlah kegiatan tugas ASN   | -           | -           | 2 Kegiatan      | 10.000      | 2 Kegiatan      | 10.000      | 4 Kegiatan      | 20.000        |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah dokumen yang diverifikasi keuangan                                   | -           | -           | 12 buku/dokumen | 10.000      | 12 buku/dokumen | 10.000      | 24 buku/dokumen | 20.000        |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan             | Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan  | -           | -           | 5 buku/Dokumen  | 10.000      | 5 buku/Dokumen  | 10.000      | 10 buku/Dokumen | 20.000        |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.02.08 | Penyusunan pelaporan dan analisis pronognosis realisasi anggaran  | Jumlah dokumen pronognosis realisasi anggaran                               | -           | -           | 5 Dokumen       | 10.000      | 5 Dokumen       | 10.000      | 10 Dokumen      | 20.000        |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD                         | Jumlah Kegiatan pelaksanaan Akuntansi SKPD                                  | -           | -           | 3 Dokumen       | 10.000      | 3 Dokumen       | 10.000      | 6 Dokumen       | 20.000        |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.16    | Layanan Administrasi DPRD   | Persentase pemenuhan administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD                 | 100%        | 575.457.700 | 100%            | 586.986.854 | 100%            | 586.987.154 | 100%            | 1.749.431.708 | Setwan | Setwan |
|  |  | 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Rapat Paripurna) | Jumlah Kegiatan Rapat Paripurna dan Risalah Paripurna                       | 39 kegiatan | 375.458.150 | 50 kegiatan     | 382.967.313 | 50 kegiatan     | 382.967.313 | 139 kegiatan    | 1.141.392.776 |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD  | Jumlah Kegiatan Rapat Fraksi  | 12 kegiatan | 199.999.550 | 96 kegiatan     | 203.999.541 | 96 kegiatan     | 203.999.541 | 36 kegiatan     | 607.998.632   |        |        |

|  |  |                     |   |  |                                     |                    |  |                    |  |                    |  |                    |        |        |
|--|--|---------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--------|--------|
|  |  | 4.02.01.2.<br>16.04 | Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD        | Jumlah kebutuhan Perlatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pimpinan dan Anggota DPRD  | -                                   | -                  | 1 Paket                                    | 10.000             | 1 Paket                                    | 10.000             | 2 Paket                                    | 20.000             |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.<br>16.01 | Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD   | -                                   | -                  | 1 kegiatan                                 | 10.000             | 2 kegiatan                                 | 10.300             | 3 kegiatan                                 | 20.300             |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.<br>15    | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD       | Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Anggota dan Pimpinan DPRD   | 100%                                | 25.265.790<br>.063 | 100%                                       | 25.771.105<br>.864 | 100%                                       | 26.024.887.<br>489 | 100%                                       | 77.061.783.4<br>16 | Setwan | Setwan |
|  |  | 4.02.01.2.<br>15.01 | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD    | Gaji Dan Tunjangan Dewan   | 35 orang                            | 24.880.551<br>.463 | 35 orang                                   | 25.378.162<br>.492 | 35 orang                                   | 25.631.944.<br>117 | 35 orang                                   | 75.890.658.0<br>72 |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.<br>15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD             | Jumlah terpenuhinya Jaminan Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya                             | 35 orang                            | 193.528.00<br>0    | 35 orang                                   | 197.398.56<br>0    | 35 orang                                   | 197.398.56<br>0    | 35 orang                                   | 588.325.120        |        |        |
|  |  | 4.02.01.2.<br>15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD     | Jumlah Pakain Dinas dan Atribut (PSH, PDH, PSR, pakaian Adat DPRD, Pakaian kerja lapangan & rompi lapangan dan atribut DPRD) | 35,<br>35,<br>35,<br>35, 35<br>stel | 191.710.60<br>0    | 35,<br>35,<br>35,<br>35,<br>35, 35<br>stel | 195.544.81<br>2    | 35,<br>35,<br>35,<br>35,<br>35, 35<br>stel | 195.544.81<br>2    | 35,<br>35,<br>35,<br>35,<br>35, 35<br>stel | 582.800.224        |        |        |

|  |   |                 |  |  |                          |                |             |                |             |                |             |                |            |            |
|--|---|-----------------|--|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|------------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD | Meningkatnya dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | 4.02.02         | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD             | Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                    | 100%                     | 19.176.613.998 | 100%        | 19.656.029.348 | 100%        | 19.825.071.200 | 100%        | 58.657.714.546 |            |            |
|  |   | 4.02.02.2.01    | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                | Persentase Raperda Yang ditetapkan menjadi Perda                               | <b>100%</b>              | 4.846.757.000  | 100%        | 4.943.692.140  | 100%        | 5.037.145.642  | 100%        | 14.827.594.782 | Setwa<br>n | Setwa<br>n |
|  |   | 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Pansus Non Raperda dan terfasilitasinya kegiatan pembahasan propemperda | 7 kegiatan               | 1.675.174.200  | 24 kegiatan | 1.708.677.684  | 24 kegiatan | 1.742.851.238  | 24 kegiatan | 5.126.703.122  |            |            |
|  |   | 4.02.02.2.01.02 | Pemahasan Rancangan Peraturan Daerah                           | Jumlah Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama ditetapkan menjadi perda   | 11 Perda                 | 2.651.999.900  | 14 perda    | 2.705.039.898  | 17 perda    | 2.759.140.696  | 42 perda    | 8.116.180.494  |            |            |
|  |   | 4.02.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan                      | Jumlah terlaksananya konsultasi dan koordinasi kajian perundang undangan       | 16 exp/buku, 5 kgt rapat | 57.499.900     | 3 kegiatan  | 58.649.898     | 5 kegiatan  | 59.822.896     | 13 kegiatan | 175.972.694    |            |            |

|  |  |                 |   |  |                         |               |                         |               |                         |               |                         |                |        |        |
|--|--|-----------------|---|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------|--------|
|  |  | 4.02.02.2.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan dan /atau Naskah akademik | Jumlah terlaksananya konsultasi dan koordinasi Penjelasan/keterangan dan /atau Naskah akademik | 3 Naskah Akademik       | 196.380.000   | 5 kegiatan              | 200.307.600   | 5 kegiatan              | 204.313.752   | 13 kegiatan             | 601.001.352    |        |        |
|  |  | 4.02.02.2.01.05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD   | Jumlah terfasilitasinya Kegiatan Tata Tertib DPRD  | 1 Peraturan Tata Tertib | 265.703.000   | 1 Peraturan Tata Tertib | 271.017.060   | 1 Peraturan Tata Tertib | 271.017.060   | 3 Peraturan Tata Tertib | 807.737.120    |        |        |
|  |  | 4.02.03.2.02    | Pembahasan Kebijakan Anggaran   | Persentase Terfasilitasi Pembahasan APBD   | 100%                    | 2.480.574.600 | 100%                    | 2.531.186.092 | 100%                    | 2.531.186.092 | 100%                    | 7.542.946.784  | Setwan | Setwan |
|  |  | 4.02.03.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS   | Terwujudnya KUA dan PPAS   | 5 kegiatan              | 54.492.500    | 5 kegiatan              | 55.582.350    | 5 kegiatan              | 55.582.350    | 5 kegiatan              | 165.657.200    |        |        |
|  |  | 4.02.03.2.02.02 | Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan                                     | Terwujudnya KUPA dan PPAS Perubahan  | 5 kegiatan              | 54.492.500    | 5 kegiatan              | 55.582.350    | 5 kegiatan              | 55.582.350    | 5 kegiatan              | 165.657.200    |        |        |
|  |  | 4.02.03.2.02.03 | Pembahasan APBD   | Keputusan hasil pembahasan APBD  | 12 kegiatan             | 791.039.900   | 12 kegiatan             | 806.860.698   | 12 kegiatan             | 806.860.698   | 12 kegiatan             | 2.404.761.296  |        |        |
|  |  | 4.02.03.2.02.04 | Pembahasan APBD Perubahan   | Keputusan hasil pembahasan APBD Perubahan  | 13 kegiatan             | 790.939.800   | 13 kegiatan             | 806.758.596   | 13 kegiatan             | 806.758.596   | 13 kegiatan             | 2.404.456.992  |        |        |
|  |  | 4.02.03.2.02.05 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                    | keputusan hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD   | 1 kegiatan              | 789.609.900   | 1 kegiatan              | 805.402.098   | 1 kegiatan              | 805.402.098   | 1 kegiatan              | 2.400.414.096  |        |        |
|  |  | 4.02.03.2.02.06 | Pembahasan Laporan Semester   | Jumlah laporan semesteran  | -                       | -             | 2 kegiatan              | 1.000.000     | 2 kegiatan              | 1.000.000     | 2 kegiatan              | 2.000.000      |        |        |
|  |  | 4.02.03.2.03    | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                               | Persentase Terfasilitasi kegiatan Komisi   | 100%                    | 4.073.566.100 | 100%                    | 4.155.077.422 | 100%                    | 4.155.077.420 | 100%                    | 12.383.720.942 | Setwan | Setwan |

|  |  |                 |  |  |   |               |   |               |   |               |   |               |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|--|
|  |  | 4.02.03.2.03.01 | Pengawasan Pemerintah dibidang hukum dan pemerintahan (Komisi 1) | Jumlah kegiatan urusan Pemerintah dibidang hukum dan pemerintahan (Komisi 1) | 20 kegiatan rapat, 25 kegiatan penganawasan bidang hukum & Pemerintahan | 1.342.303.100 | 20 kegiatan rapat, 25 kegiatan penganawasan bidang hukum & Pemerintahan | 1.369.149.162 | 20 kegiatan rapat, 25 kegiatan penganawasan bidang hukum & Pemerintahan | 1.369.149.162 | 30 kegiatan rapat, 33 kegiatan penganawasan bidang hukum & Pemerintahan | 4.080.601.424 |  |  |
|  |  | 4.02.03.2.03.04 | Pengawasan Pemerintah dibidang Ekonomi (komisi 2)                | Jumlah kegiatan urusan Pemerintah dibidang Ekonomi (komisi 2)                | 20 kegiatan rapat, 25 kegiatan penganawasan bidang ekonomi              | 1.355.270.000 | 20 kegiatan rapat, 25 kegiatan penganawasan bidang ekonomi              | 1.382.375.400 | 20 kegiatan rapat, 25 kegiatan penganawasan bidang ekonomi              | 1.382.375.400 | 30 kegiatan rapat, 33 kegiatan penganawasan bidang ekonomi              | 4.120.020.800 |  |  |
|  |  | 4.02.03.2.03    | Pengawasan Pemerintah dibidang kesejahteraan (komisi 3)          | Jumlah kegiatan urusan Pemerintah dibidang kesejahteraan (komisi 3)          | 20 kegiatan rapat, 25 kegiatan penganawasan bidang kesejahteraan        | 1.375.993.000 | 20 kegiatan rapat, 25 kegiatan penganawasan bidang kesejahteraan        | 1.403.512.860 | 20 kegiatan rapat, 25 kegiatan penganawasan bidang kesejahteraan        | 1.403.512.860 | 30 kegiatan rapat, 33 kegiatan penganawasan bidang kesejahteraan        | 4.183.018.720 |  |  |

|  |  |                 |   |   |   |   |   |        |   |        |   |        |  |  |
|--|--|-----------------|---|---|---|---|---|--------|---|--------|---|--------|--|--|
|  |  | 4.02.03.2.03.02 | Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur | - | - | 1 kegiatan rapat, 2 kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur | 10.000 | 1 kegiatan rapat, 2 kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur | 9.998  | 1 kegiatan rapat, 2 kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur | 19.998 |  |  |
|  |  | 4.02.03.2.03.0  | Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan keuangan                         | - | - | 1 Dokumen laporan keuangan  | 10.000 | 2 Dokumen laporan keuangan  | 10.000 | 3 Dokumen laporan keuangan  | 20.000 |  |  |
|  |  | 4.02.03.2.03.07 | Pengawasan Pengguna Anggaran  | Jumlah terlaksananya Pengawasan Pengguna Anggaran       | - | - | 2 Kegiatan pengawasan pengguna anggaran   | 10.000 | 2 Kegiatan pengawasan pengguna anggaran   | 10.000 | 2 Kegiatan pengawasan pengguna anggaran   | 20.000 |  |  |



|  |  |                 |  |  |                               |               |   |               |   |               |                               |               |        |        |
|--|--|-----------------|--|--|-------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|--------|--------|
|  |  | 4.02.03.2.03.05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | terlaksana Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | -                             | -             | 1 kegiatan rapat, 2 kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 10.000        | 1 kegiatan rapat, 2 kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 10.000        | 20.000                        |               |        |        |
|  |  | 4.02.02.2.04    | Peningkatan Kapasitas DPRD                             | Persentase Pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas & Fungsi DPRD                                       | 100%                          | 2.937.128.850 | 100%  | 2.995.901.427 | 100%  | 2.995.901.427 | 100%                          | 8.928.931.704 | Setwan | Setwan |
|  |  | 4.02.02.2.04.02 | Bimbingan Teknis DPRD                                  | Jumlah kegiatan Adeksi, Partai dan Bimtek DPRD   | 3 kegiatan                    | 1.292.536.000 | 3 kegiatan  | 1.318.386.720 | 5 kegiatan  | 1.318.386.720 | 5 kegiatan                    | 3.929.309.440 |        |        |
|  |  | 4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                        | Website DPRD, Dokumentasi kegiatan, Sosialisasi Promosi kegiatan DPRD (Buletin, Advortorial, Baliho) | 2 buah, 1200 lembar, 12 bulan | 621.251.150   | 2 buah, 1500 lembar, 12 bulan   | 633.676.173   | 2 buah, 1500 lembar, 12 bulan   | 633.676.173   | 2 buah, 1500 lembar, 12 bulan | 1.888.603.496 |        |        |

|  |  |                 |  |  |             |               |             |               |             |               |             |                |         |         |
|--|--|-----------------|--|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------|---------|
|  |  | 4.02.02.2.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD ( Banmus)        | Pembahasan Agenda Rencana Kegiatan tahunan DPRD, pembahasan agenda rencana kegiatan bulanan DPRD, Dokumen hasil rapat  | 18 kegiatan | 502.276.800   | 12 kegiatan | 512.322.336   | 12 kegiatan | 512.322.336   | 42 kegiatan | 1.526.921.472  |         |         |
|  |  | 4.02.02.2.04.05 | Penyediaan tenaga ahli fraksi                  | Jumlah tenaga ahli fraksi yang terbayarkan   | 8 orang     | 521.064.900   | 8 orang     | 531.486.198   | 8 orang     | 531.486.198   | 24 orang    | 1.584.037.296  |         |         |
|  |  | 4.02.02.2.04.01 | Orientasi DPRD                                 | Jumlah orientasi DPRD  | -           | 0             | 1 kegiatan  | 10.000        | 1 kegiatan  | 10.000        | 2 kegiatan  | 20.000         |         |         |
|  |  | 4.02.02.2.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar                      | Jumlah Penyediaan kelompok pakar   | -           | 0             | 3 orang     | 10.000        | 3 orang     | 10.000        | 6 orang     | 20.000         |         |         |
|  |  | 4.02.02.2.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat            | Jumlah kegiatan Humas  | -           | 0             | 3 kegiatan  | 10.000        | 3 kegiatan  | 10.000        | 6 kegiatan  | 20.000         |         |         |
|  |  | 4.02.02.2.05    | Penyerapan dan Penghimpunan Asprasi masyarakat | Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti   | 100%        | 3.674.569.850 | 100%        | 3.778.355.879 | 100%        | 3.853.244.232 |             | 11.306.169.961 | Setwa n | Setwa n |
|  |  | 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses                              | Jumlah Kejiata Reses: 1. Masa Persidangan ke I ( Tgl 2 Sept - Desember 2021), 2. Masa Persidangan ke II ( Januari - April 2021), 3. masa Persidangan III ( Mei - Agustus 2021) | 3 kegiatan  | 3.558.069.850 | 3 kegiatan  | 3.629.231.247 | 3 kegiatan  | 3.701.815.872 | 9 kegiatan  | 10.889.116.969 |         |         |
|  |  | 4.02.02.2.0501  | Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Hearing)         | Dialouge/hearing dan Kopdar  | 6 kegiatan  | 116.500.000   | 8 kegiatan  | 118.830.000   | 10 kegiatan | 118.830.000   | 24 kegiatan | 354.160.000    |         |         |

|                 |  |                 |   |   |                    |             |                     |             |                     |             |                      |             |         |         |
|-----------------|--|-----------------|---|---|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------|---------|
|                 |  | 4.02.02.2.05.02 | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran                                      | Jumlah Dokumen pokok-pokok pikiran  | -                  | 0           | 35 Dokumen          | 30.294.632  | 35 Dokumen          | 32.598.360  | 35 Dokumen           | 62.892.992  |         |         |
|                 |  | 4.02.02.2.06    | Pelaksanaan dan pengawasan Kode etik DPRD                           | Persentase kepatuhan DPRD terhadap Tatib dan Kode Etik  | 100%               | 289.013.398 | 100%                | 303.464.068 | 100%                | 303.464.068 | 100%                 | 895.941.534 | Setwa n | Setwa n |
|                 |  | 4.02.02.2.06.01 | Penyusunan Kode Etik DPRD   | Jumlah sidang/rapat/rekomendasi/ran/keputusan   | 3 buku, 322 lembar | 144.506.699 | 24 buku, 400 lembar | 151.732.034 | 24 buku, 400 lembar | 151.732.034 | 51 buku, 1122 lembar | 447.970.767 |         |         |
|                 |  | 4.02.02.2.06.02 | Pengawasan Kode Etik DPRD   | Jumlah terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, jumlah rapat-rapat pengawasan dan penegakan kode etik dan tatib | 5 kgtan            | 144.506.699 | 12 kgtan            | 151.732.034 | 12 kgtan            | 151.732.034 | 29 kgtan             | 447.970.767 |         |         |
| Usulan kegiatan |  | 4.02.02.2.07    | Pembahasan Kerja sama Daerah  | Persentase Pembahasan Kerja sama yang ditindak lanjuti  | 100%               | 0           | 100%                | 2.000.000   | 100%                | 2.700.000   | 100%                 | 4.700.000   | Setwa n | Setwa n |
|                 |  | 4.02.02.2.07.01 | Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah | Jumlah kegiatan Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah yang dilaksanakan           | -                  | -           | 3 kegiatan          | 1.000.000   | 3 kegiatan          | 1.350.000   | 3 kegiatan           | 2.350.000   |         |         |
|                 |  | 4.02.02.2.07.02 | Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi                           | Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi   | -                  | -           | 3 kegiatan          | 1.000.000   | 3 kegiatan          | 1.350.000   | 3 kegiatan           | 2.350.000   |         |         |

|  |  |  |  |   |             |             |                |             |                |             |                |               |                 |            |  |
|--|--|--|--|---|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--|
|  |  | 4.02.02.2.08                             | Fasilitasi Tugas DPRD                                    | Persentase Terasilinasinya Kegiatan Agenda Anggota & Pimpinan DPRD    | 100%        | 875.004.200 | 100%           | 946.352.320 | 100%           | 946.352.320 | 100%           | 2.767.708.840 | Setwa<br>n      | Setwa<br>n |  |
|  |  | 4.02.02.2.08.01                          | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD         | Jumlah terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | 8 kegiatan  | 265.057.200 | 10 kegiatan    | 304.815.780 | 10 kegiatan    | 304.815.780 | 28 kegiatan    | 874.688.760   |                 |            |  |
|  |  | 4.02.02.2.08.03                          | Fasilitasi pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Perjadin) | Jumlah kegiatan Koordinasi Badan Musyawarah DPRD Kota Sukabumi        | 12 kegiatan | 502.277.000 | 27 kegiatan    | 512.322.540 | 27 kegiatan    | 512.322.540 | 66 kegiatan    | 1.526.922.080 |                 |            |  |
|  |  | 4.02.02.2.08.04                          | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                           | jumlah terlaksananya undangan Pimpinan DPRD                           | 6 kegiatan  | 107.670.000 | 10 kegiatan    | 129.204.000 | 15 kegiatan    | 129.204.000 | 31 kegiatan    | 366.078.000   |                 |            |  |
|  |  | 4.02.02.2.08.02                          | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                          | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD                                   | -           | -           | 6 Dokumen      | 10.000      | 6 Dokumen      | 10.000      | 12 Dokumen     | 20.000        |                 |            |  |
|  |  | Pagu T.A 2022 + dengan usulan kegtan/Sub |  |   |             |             | 52.495.978.384 |             | 53.808.377.844 |             | 54.248.391.404 |               | 160.552.747.632 |            |  |

Sumber : Sub Bagian Program & Keuangan Sekretariat DPRD

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat adalah peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah. Penetapan indikator kinerja Sekretariat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Sekretariat. Maka indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD.

7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Sekretariat yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 7.1.A  
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No.      | Indikator  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018 | Target Capaian Setiap Tahun |          |
|----------|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|
|          |  |                                       | 2019                        | 2020     |
| <i>1</i> | <i>2</i>   | <i>3</i>                              | <i>4</i>                    | <i>5</i> |
| 1        | Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Persen                                | 100                         | 100      |
| 2        | Meningkatnya Fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan daerah      | Persen                                | 100                         | 100      |
| 3        | Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran           | Persen                                | 100                         | 100      |

Sumber : Bagian Persidangan & PerUU Sekretariat DPRD

Tabel 7.2 ...

Tabel 7.2.B  
 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD  
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018 | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |  |
|-----|--|---------------------------------------|-----------------------------|------|------|--|
|     |  |                                       | 2021                        | 2022 | 2023 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
| 1   | 2  | 3                                     | 6                           | 7    | 8    | 9  |
| 1   | Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah | Persen                                | 100                         | 100  | 100  | 100                                      |
| 2   | Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD       | Persen                                | 100                         | 100  | 100  | 100                                      |
| 3   | Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD     | Persen                                | 100                         | 100  | 100  | 100                                      |

Sumber : Bagian Persidangan & PerUU Sekretariat DPRD

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama Tahun 2018-2023 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Renja, Renstra dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Selanjutnya Renstra Tahun 2018-2023 ini menjadi acuan kerja bagi bagian-bagian di lingkungan Sekretariat. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Perlu disampaikan pula bahwa penyusunan Renstra ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Perubahan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen Renstra ini bersifat fleksibilitas dalam pelaksanaannya mampu menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku.

Demikian Perubahan renstra ini dibuat, semoga menjadi pedoman dalam pelaksanaan program lima tahun ke depan untuk Sekretariat dalam memfasilitasi DPRD.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI